



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025-2026**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024**



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan berakhir pada Tahun 2024 dan dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024 dibutuhkan dokumen rencana pembangunan sampai ditetapkan Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, Bupati menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 serta memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra PD Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2026 serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RENSTRA PD TAHUN 2025-2026

Pasal 2

- (1) Renstra PD Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

- (1) Renstra PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Renstra Dinas Kesehatan;
 - c. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- d. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
- f. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- i. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
- j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- m. Renstra Dinas Perhubungan;
- n. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
- r. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- s. Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan;
- t. Renstra Sekretariat Daerah;
- u. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- v. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- w. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- y. Renstra Inspektorat;
- z. Renstra Kecamatan Salaman;
- aa. Renstra Kecamatan Borobudur;
- bb. Renstra Kecamatan Ngluwar;
- cc. Renstra Kecamatan Salam;
- dd. Renstra Kecamatan Srumbung;
- ee. Renstra Kecamatan Dukun;
- ff. Renstra Kecamatan Sawangan;
- gg. Renstra Kecamatan Muntilan;
- hh. Renstra Kecamatan Mungkid;
- ii. Renstra Kecamatan Mertoyudan;
- jj. Renstra Kecamatan Tempuran;
- kk. Renstra Kecamatan Kajoran;
- ll. Renstra Kecamatan Kaliangkrik;
- mm. Renstra Kecamatan Bandongan;
- nn. Renstra Kecamatan Candimulyo;
- oo. Renstra Kecamatan Pakis;
- pp. Renstra Kecamatan Ngablak;
- qq. Renstra Kecamatan Grabag;
- rr. Renstra Kecamatan Tegalrejo;
- ss. Renstra Kecamatan Secang;
- tt. Renstra Kecamatan Windusari; dan
- uu. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (3) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122
Kode Pos 56511 Website: www.magelangkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Drs. ADI WARYANTO.

NIP : 19660304 199203 1 007

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang

Berdasar Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/821/KEP/22/2019 tanggal 6 Agustus 2019, bertugas untuk dan atas nama Sekretariat Daerah berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:

1. Rancangan Rencana Strategis disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mewujudkan program kerja berdasarkan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO

Pembina Utama Muda

NIP.19660304 199203 1 007

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, atas petunjuk dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025-2026 dapat terselesaikan. Renstra Sekretariat Daerah merupakan salah satu produk perencanaan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Dokumen ini disusun berdasarkan usulan dan masukan dari berbagai unsur dan pemangku kepentingan.

Kendala yang kami hadapi dalam penyusunan Renstra adalah kurangnya apresiasi terhadap dokumen yang disusun, baik ketepatan waktu, validitas data maupun kelengkapan dokumen, sehingga mempengaruhi kelancaran dan kesempurnaan dalam penyusunan dokumen. Meskipun demikian sudah menjadi komitmen kami untuk menyusun dokumen sebaik mungkin sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan Renstra. Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran untuk penyempurnaan Renstra dan penyusunan dokumen lainnya. Semoga Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025 - 2026 mempunyai nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Magelang, Aamiin.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH



Drs. ADI WARYANTO

Pembina Utama Muda

NIP.19660304 199203 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI	ii
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-1
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-7
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-10
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	II-23
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	III-1
3.2. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	III-3
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-6
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	III-11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	V-1

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Berdasarkan Golongan dan Eselon	II-7
Tabel 2.2	Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.	II-8
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2023.	II-12
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2019-2023.	II-21
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.	III-2
Tabel 3.2	Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah.	III-5
Tabel 3.3	Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan.	III-8
Tabel 3.4	Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD terkait Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025 – 2026.	III-9
Tabel 3.5	Pemetaan Isu-isu Strategis Pembangunan Global, Nasional dan Daerah.	III-15
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.	IV-4
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.	V-1
Tabel 6.0	Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025-2026.	VI-2
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2025-2026	VII-1
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026	VII-3

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025-2026	Lamp.1
Tabel 7.2	Cascading Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	Lamp. 2
Tabel 7.3	Pohon Kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	Lamp. 3
Tabel 7.4	Kode Indikator Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026	Lamp. 4

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023.	II-10
------------	--	-------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	Sekretariat Daerah	II-6
	Kabupaten Magelang.		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 2024, dan diperkirakan pelantikan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2025. Terhadap kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir tahun 2024 telah diterbitkan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023.

Kabupaten Magelang termasuk salah satu dari 53 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2024, sehingga terdapat kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sampai dilantiknya Bupati terpilih hasil pilkada tahun 2024. Oleh karena itu untuk perencanaan tahun 2025 dan tahun 2026 perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

Dokumen RPD tersebut bersifat transisi menunggu Bupati Magelang terpilih dan definitif. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman bagi penjabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dokumen RPD ini ditindaklanjuti oleh seluruh Kepala PD dengan menyusun Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus ditempuh oleh setiap PD dalam menjawab tuntutan lingkungan dan perkembangan wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diembannya. Renstra memiliki peran yang sangat penting untuk menuntun PD dalam memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Renstra menjadi kunci yang akan menunjukkan penjabaran kebijakan melalui rencana-rencana yang sangat prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, karena itu rencana-rencana yang dimaksud disertai dengan target yang harus dipenuhi dan dipertanggung jawabkan pencapaiannya, sehingga secara nyata kebijakan yang diambil dapat diketahui pula pencapaiannya. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan secara akuntabel.

Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa menjadi cita-cita dan harapan setiap warga negara, serta tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *“Good Governance”* yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, efisien dan efektif yakni dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan

demikian pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat, baik secara politik, hukum, maupun ekonomi dan di informasikan secara terbuka kepada publik.

Untuk mewujudkan *Clean and Good Governance* merupakan tantangan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga keinginan masyarakat terhadap pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat menjadi kenyataan. Langkah yang perlu dan harus dikembangkan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan terlegitimasi, sehingga penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka itu, cara pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang perlu dilakukan adalah membangun perubahan secara bersama-sama baik perubahan sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Perwujudan *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dan profesionalisme serta kinerja yang tinggi. Seluruh pegawai Sekretariat Daerah (SETDA) harus merespon perubahan lingkungan dan perkembangan wilayah yang demikian cepat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dilaksnakannya Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dengan instansi terkait.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan menjamin adanya *sustainability* (berkelanjutan) program dari waktu ke waktu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Rencana Strategis K/L dan Renstra Propinsi
 - 3.2.1. Telaah Renstra Kementrian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara.
 - 3.2.2. Telaah Renstra Sekretariat Provinsi Jawa Tengah
- 3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

	3.3.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah
	3.3.2. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten.

Kedudukan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dimana Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur staf dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan fungsinya diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana berikut:

- a. Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- b. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
 - 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 4) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
 - 5) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
 - 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
 - 8) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan

- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah didukung oleh 3 (tiga) asisten dan 9 (sembilan) bagian yang memiliki pembagian tugas sebagai berikut:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Pemerintahan dibantu 3 (tiga) Bagian dengan tugas sebagai berikut:

1) Bagian Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama dan otonomi daerah.

2) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Dokumentasi, Informasi dan Evaluasi Hukum.

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaan

tugas perangkat daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dibantu 3 (tiga) Bagian dengan tugas sebagai berikut:

1) Bagian Perekonomian dan SDA

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian, Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Sumber Daya Alam.

2) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pelayanan administratif di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pembinaan dan fasilitasi, pelayanan administrasi serta pengendalian pelaksanaantugas perangkat daerah di bidang umum, Organisasi, serta Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Asisten Administrasi Umum dibantu 3 (tiga) Bagian dengan tugas sebagai berikut:

1) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

2) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan.

3) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai berikut:

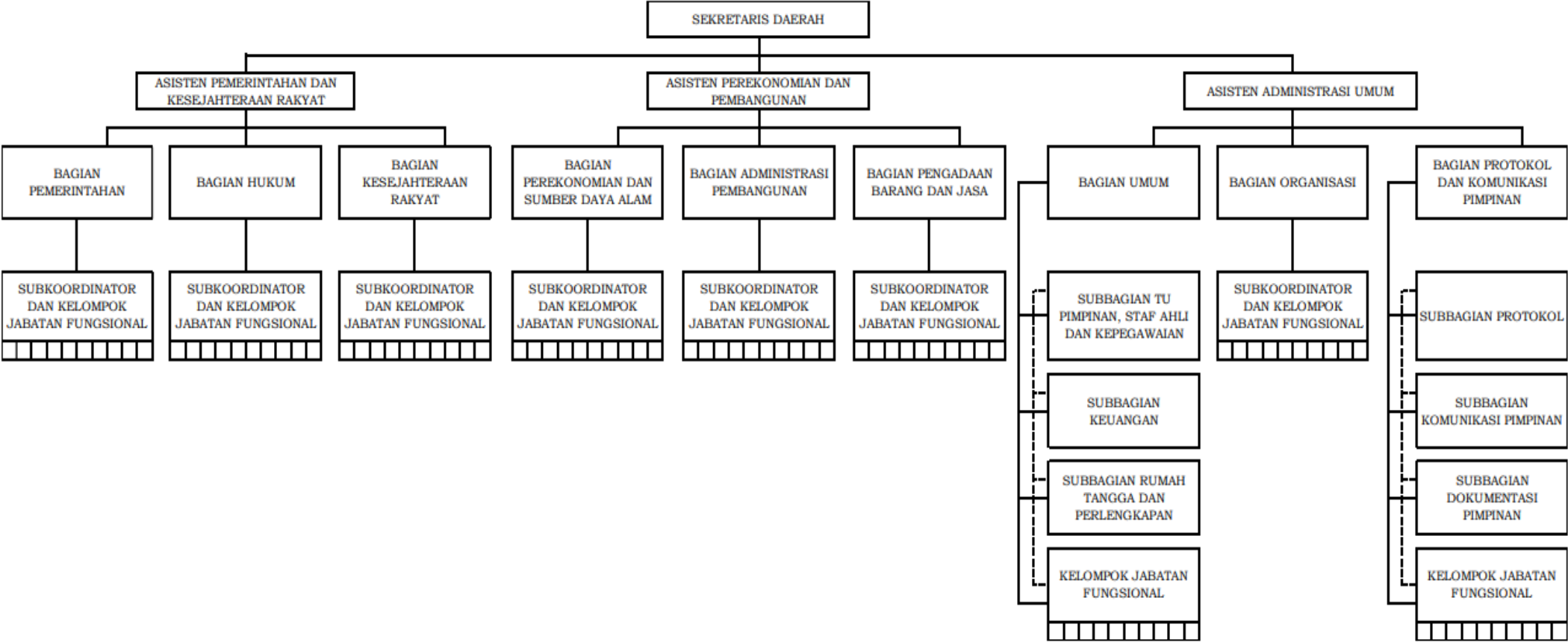
Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah meliputi:

- 1) Sekretaris Daerah;
- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bagian Hukum, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
 - c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - a) Bagian Organisasi, membawahi:
Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

- b) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:
 - Subbagian Protokol
 - Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bagian Umum, membawahi:
 - Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang secara lengkap sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang



Sumber: Peraturan Bupati Magelang Nomor 54 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025-2026

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Sumber daya Sekretariat Daerah terdiri dari sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, adapun secara rinci sebagai berikut:

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk berjalannya suatu organisasi, karena dengan sumber daya manusia yang optimal baik secara kualitas maupun kuantitas akan mempengaruhi kinerja Organisasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2023 sebanyak 140 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
Berdasarkan Golongan dan Eselon

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Per-Golongan								Jumlah Berdasarkan Eselon										Jumlah PNS		
		Gol 1		Gol 2		Gol 3		Gol 4		II		III		IV		JFT		JFU		L	P	Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Sekretaris Daerah	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	Asisten	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
3	Staf Ahli	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
4	Bagian Pemerintahan	0	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	6	4	10
5	Bagian Hukum	0	0	0	1	1	9	0	1	0	0	0	1	0	0	1	8	0	2	1	11	12
6	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	1	4	1	5
7	Bagian Administrasi Pembangunan	0	0	1	0	0	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	2	5	7
8	Bagian Pengadaan Barang Jasa	0	0	2	0	14	12	1	0	0	0	1	0	0	0	11	10	5	2	17	12	29
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	1	8	1	2	0	0	0	1	0	0	0	4	1	5	1	10	2	12
10	Bagian Organisasi	0	0	1	0	1	3	3	1	0	0	1	0	0	0	3	1	1	3	5	4	9
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	0	0	0	0	5	5	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0	2	5	6	5	11
12	Bagian Umum	2	0	12	7	4	10	1	2	0	0	1	0	0	3	1	1	17	15	19	19	38
Jumlah :		2	0	16	9	40	49	19	5	7	0	7	1	3	3	23	26	37	33	77	63	140
		2		25		89		24		7		8		6		49		70		140		
Presentase :		1.43	0	11.4	6.43	28.6	35	13.6	3.57	5	0	5	0.71	2.14	2.14	16.4	18.6	26.4	23.6	55	45	100
		1.4		17.9		63.6		17.1		5.0		5.7		4.3		35.0		50.0		100		

Sumber: Aplikasi Semar BKPPD Kabupaten Magelang 2023.

Berdasarkan tabel diatas jumlah PNS di Sekretariat Daerah sebanyak 139 orang dengan rasio berdasarkan jenis kelamin perbandingan laki-laki dan perempuan sebesar 1: 0.8 orang. Jumlah PNS terbanyak berdasarkan golongan adalah golongan III yaitu 89 orang atau 63.6%, sedangkan berdasarkan eselon terbanyak pada jabatan fungsional umum sebanyak 70 orang atau 50.0%.

Jumlah pegawai tersebut masih belum ideal dibandingkan dengan formasi jabatan yang harus ada, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan pemenuhan pegawai tersebut karena adanya kebijakan pemerintah untuk tidak ada penambahan pegawai atau *zero grow*.

2.2.3. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Sekretariat Daerah dapat dilihat berdasarkan aset yang dimiliki, baik jumlah aset maupun nilai harga dari aset yang dimiliki, secara detail kondisi aset Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

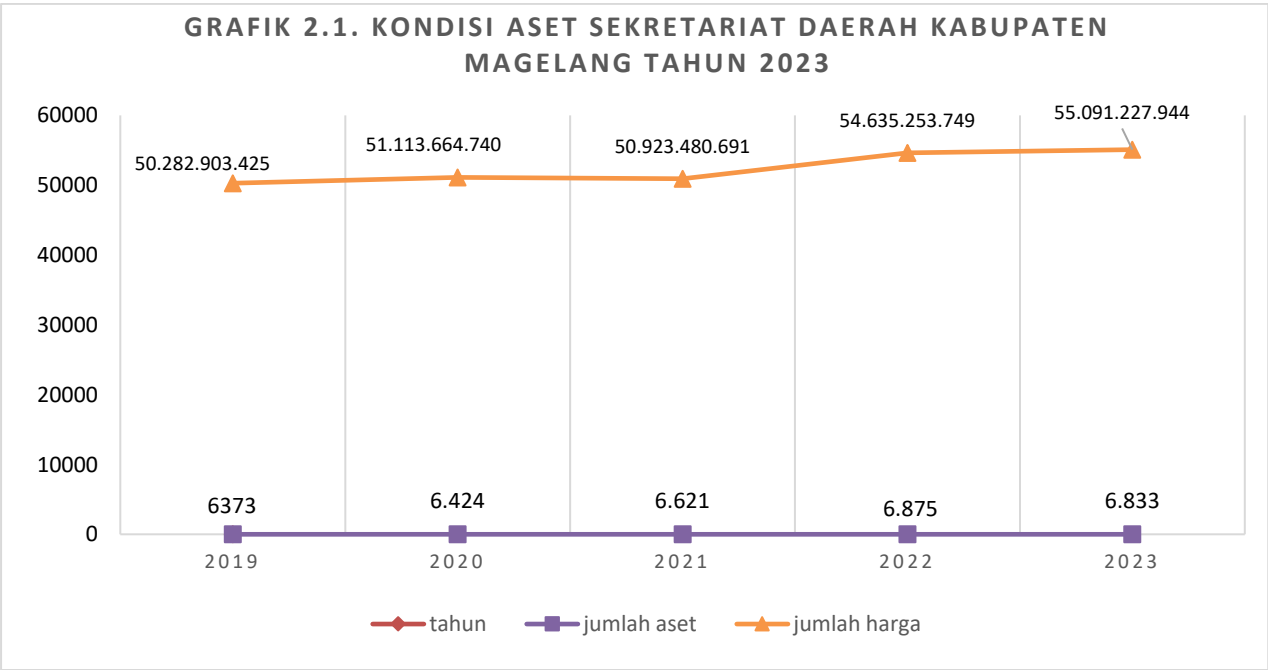
No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2020				Tahun 2022		Tahun2023	
				JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)			JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	
1	1.3.1		TANAH							-	-	-	-	
2		1.3.1.01	TANAH	12	10,915,800,000	12	10,915,800,000	10	7,152,700,000	10	7,152,700,000	8	6,561,700,000	
3	1.3.2		PERALATAN DAN MESIN					-	-	-	-	-	-	
4		1.3.2.01	ALAT BESAR	4	683,589,200	4	683,589,200	4	683,589,200	5	1,494,967,493	3	1,115,794,493	
5		1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	97	11,403,763,506	97	11,560,956,596	102	11,928,887,068	103	11,865,572,298	103	13,476,307,993	
6		1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	32	77,245,325	32	77,245,325	32	77,245,325	32	77,245,325	32	77,245,325	
7		1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	8	8,650,000	8	8,650,000	8	8,650,000	12	12,650,000	12	12,650,000	
8		1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	3,950	7,830,912,240	3,972	7,919,987,240	4,074	8,157,627,973	4,217	8,954,200,613	4,183	8,999,798,613	
9		1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	367	1,402,899,114	371	1,452,054,114	374	1,581,272,364	421	1,722,552,364	419	1,714,570,364	
10		1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
11		1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-		7	3,432,725	7	3,432,725	7	3,432,725	9	18,432,725	
12		1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
13		1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	297	1,834,276,927	309	1,927,982,927	372	2,367,061,277	422	3,117,633,777	422	3,117,633,777	
14		1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-		-		-	-	-	-	-	-	
15		1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
16		1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
17		1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-		-		-	-	-	-	-	-	
18		1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-		-		-	-	-	-	-	-	
19		1.3.2.16	ALAT PERAGA	-		-		-	-	-	-	-	-	
20		1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-		-		-	-	-	-	-	-	

No.	KODE AKUN	KODE OBJEK	KETERANGAN	Tahun 2019		Tahun 2020	Tahun 2020				Tahun 2022		Tahun2023	
				JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)			JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	JUMLAH	JUMLAH HARGA DLM RIBUAN (Rp.)	
21		1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-		-		-	-	-	-	-	-	
22		1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-		-		-	-	-	-	-	-	
23	1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
24		1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	100	13,579,247,006	84	13,544,299,706	80	15,761,826,852	80	16,852,551,247	76	16,615,346,747	
25		1.3.3.02	MONUMEN	-		7	3,400,000	7	3,400,000	7	3,400,000	7	3,400,000	
26		1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-		-		-	-	-	-	-	-	
27		1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-		9	158,252,600	9	158,252,600	9	158,252,600	9	158,252,600	
28	1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-		-		-	-	-	-	-	-	
29		1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	1	1,265,854,815	1	1,265,854,815	1	1,265,854,815	1	1,265,854,815	1	1,265,854,815	
30		1.3.4.02	BANGUNAN AIR	5	817,933,542	5	929,052,542	6	1,113,362,542	6	1,290,579,542	6	1,290,579,542	
31		1.3.4.03	INSTALASI	3	314,280,750	5	491,866,950	5	491,866,950	5	491,866,950	5	491,866,950	
32		1.3.4.04	JARINGAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
33	1.3.5		ASET TETAP LAINNYA	-		-		-	-	-	-	-	-	
34		1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	1,481	137,756,000	1,481	137,756,000	1,514	157,756,000	1,522	161,099,000	1,522	161,099,000	
35		1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-		-		-	-	-	-	-	-	
36		1.3.5.03	HEWAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
37		1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-		-		-	-	-	-	-	-	
38		1.3.5.05	TANAMAN	16	10,695,000	16	10,695,000	16	10,695,000	16	10,695,000	16	10,695,000	
39		1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-		-		-	-	-	-	-	-	
40		1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-		-		-	-	-	-	-	-	
41	1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-		-		-	-	-	-	-	-	
42		1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-		2	22,909,000	-	-	-	-	-	-	
			JUMLAH	6,373	50,282,903,425	6,424	51,113,664,740	6,621	50,923,480,691	6,875	54,635,253,749	6,833	55,091,227,944	

Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang, data diolah 2023.

Jumlah aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2019 sejumlah 6.373, pada tahun 2020 sejumlah 6.424, tahun 2021 sejumlah 6.621, tahun 2022 sejumlah 6.875 dan tahun 2023 sejumlah 6.833. Jumlah harga/nilai aset pada tahun 2019 sebesar Rp. 50.282.903.425,00 pada tahun 2020 sebesar Rp. 51.113.664.740,00, tahun 2021 sebesar Rp 50.923.480.691,00 tahun 2022 sebesar Rp 54.635.253.749,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 55.091.227.944,00, harga/nilai aset tersebut meningkat sejalan dengan penambahan jumlah aset selama tahun berjalan.

Perkembangan kondisi aset Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Magelang, data diolah 2023.

Berdasarkan grafik diatas kondisi aset Sekretariat Daerah selama tahun 2019-2023 bertambah baik secara jumlah harga maupun jumlah aset yang dimiliki.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Tingkat capaian kinerja sasaran pada Sekretariat Daerah menggambarkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Renstra Sekretariat Daerah tahun 2019-2024. Secara umum indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dengan kriteria SMART: *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Timely* (berjangka waktu tertentu) dan *Tracable* (dapat dipantau dan dikumpulkan), selain itu penempatan indikator kinerja tidak sesuai dengan level/tingkatannya dan terdapat beberapa indikator yang bukan menjadi kewenangan dari Sekretariat Daerah. Dengan tidak memenuhi kriteria SMART maka peta *cascading* dari indikator kinerja tidak bisa dipetakan dan

tidak bisa dilihat pola kontribusi dari masing-masing indikator dalam mendukung ketercapaian indikator yang ada di atasnya.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah selama periode 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang 2019-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah																		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				61.04	63.03	61.13	67.01	69.00	50.10	60.33	65.02	62.25	63.04	82.08	95.72	106.36	92.90	90.22
1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah																		
	Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.				NA	70	72.5	NA	NA	NA	70	72.5	NA	NA	NA	100	100	NA	NA
1.1.1	persentase kebijakan pemerintahan yang dijalankan				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA
1.1.2	Prosentase dokumen kelembagaan yang ditindaklanjuti				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA
1.1.3	Prosentase dokumen ketatalaksanaan yang diterapkan				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.1.4	Prosentase unit pelayanan publik yang mendapat nilai baik				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA
1.1.5	Prosentase dokumen evaluasi kinerja SKPD yang disusun tepat waktu				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA
1.1.6	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun tepat asas				100	100	100	NA	NA	100	100	135.00	NA	NA	100	100	135	NA	NA
1.1.7	Persentase produk hukum daerah yang dikaji sesuai asas				100	100	100	NA	NA	100	100	107.14	NA	NA	100	100	107.14	NA	NA
1.1.8	Persentase permasalahan hukum yang didampingi				100	100	100	NA	NA	100	100	115.91	NA	NA	100	100	115.91	NA	NA
1.1.9	Persentase Kebijakan Perekonomian yang Dijalankan				100	100	100	NA	NA	100	138	100	NA	NA	100	138	100	NA	NA
1.1.10	Persentase BUMD yang Berkinerja Baik				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA
1.1.11	Persentase Peningkatan Sumbangan BUMD pada PAD				12	12	12	NA	NA	12	14.78	11	NA	NA	100	123.17	91.67	NA	NA
1.1.12	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian,				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100.00	NA	NA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah																		
1.1.13	Indeks Kematangan UKPBJ				3	4	4	NA	NA	2	2	2	NA	NA	66.67	50	50.00	NA	NA
1.1.14	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan				100	100	100	NA	NA	100	100	94	NA	NA	100	100	94.00	NA	NA
1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik Kesekretariatan Daerah																		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				83.5	83.75	84	84.25	84.50	83.5	83.77	84.16	NA	NA	100	100.02	100.19	NA	NA
1.2.1	Cakupan Kinerja Kehumasan dan Layanan Keprotokolan				100	100	100	NA	NA	100	100	100	NA	NA	100	100	100.00	NA	NA
1.2.2	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				100	100	100	NA	NA	100	94	100	NA	NA	100	94	100.00	NA	NA
	Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024																		
1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat																		

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Cakupan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	103.54	101.03	NA	NA	NA	103.54	101.03
1.1.1	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.1.2	Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	110.61	103.08	NA	NA	NA	110.61	103.08
1.1.3	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.2	Meningkatnyanya perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan														NA	NA	NA		
	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan				NA	NA	NA	90	94.5	NA	NA	NA	90	111.00	NA	NA	NA	100.00	117.46
1.2.1	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.2.2	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan,pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.2.3	Tingkat Kematangan UKPBJ.				NA	NA	NA	level 3 (4/9) level (progress)	level 3 (6/9) level (progress)	NA	NA	NA	level 3 (4/9) level (progress)	level 3 (8/9) level (progress)	NA	NA	NA	100.00	133.33
1.3	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah																		
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)				83.5	83.75	84.00	84.25	84.50	83.5	83.77	84.16	84.35	85.60	NA	NA	NA	100.12	101.30
1.3.1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.3.2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.3.3	Persentase ketercapaian penataan organisasi				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.3.4	Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	100.00	NA	NA	NA	100.00	100.00
1.3.5	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh				NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	100	83.33	NA	NA	NA	100.00	83.33

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 2023

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Indikator tujuan meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah tercapai sebesar 62.25 (B) pada tahun 2022, sedangkan tahun 2023 tercapai sebesar 63.04, sehingga apabila dibandingkan dengan target akhir renstra capaian kinerja sebesar 91.36% dengan status evaluasi Akan Tercapai. Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ini didukung oleh 2 indikator sasaran pada penetapan renstra tahun 2019-2024 yaitu meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah, dan pada perubahan renstra tahun 2019-2024 menjadi 3 indikator sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan dan Meningkatkan Kualitas Administrasi Umum Kesekretariatan Daerah.
2. Sasaran meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sasaran pada penetapan Renstra 2019-2024 dengan capaian indikator kinerja tahun 2020 sebesar 100% dengan status evaluasi kinerja tercapai, dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 capaian kinerja sebesar 87.50% dengan status evaluasi kinerja Akan tercapai. Faktor Penunjang keberhasilan: adanya regulasi dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dilingkungan sekretariat Daerah dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah.
3. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah, merupakan sasaran pada penetapan Renstra tahun 2019-2024 capaian indikator nilai SKM pada tahun 2020 sebesar 84.16 dan apabila dibandingkan dengan target akhir renstra 2024 capaian kinerja sebesar 98.55% dengan status evaluasi kinerja Akan tercapai. Faktor penunjang keberhasilan: adanya pembagian tugas pokok dan fungsi serta kejelasan pelaksanaan tugas antar bagian.
4. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat merupakan sasaran strategis perubahan dari sasaran strategis meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir renstra tercapai sebesar 101.03% dengan status evaluasi kinerja tercapai.
Faktor penunjang keberhasilan: Adanya regulasi dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dilingkungan Sekretariat Daerah dan perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di Sekretariat Daerah. Sasaran tersebut didukung oleh 3 (tiga) indikator pendukung sasaran yaitu: persentase perumusan kebijakan pemerintahan yang dijalankan,

Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah, dan Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Terkait permasalahan yang dihadapi tahun 2023 yaitu adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang belum disertai dengan aturan operasional dari kebijakan yang dikeluarkan.

5. Sasaran strategis meningkatnya perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan merupakan sasaran strategis pada perubahan renstra 2019-2024. Capaian sasaran meningkatnya kualitas penyusunan kebijakan ekonomi dan pembangunan capaian kinerja sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target akhir renstra capaian kinerja sebesar 111% dengan status evaluasi kinerja tercapai. Faktor penunjang keberhasilan: capaian indikator tersebut merupakan cerminan dari indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah dan Tingkat Kematangan UKPBJ. Tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu kelembagaan, Sumber daya manusia, Proses dan Sistem Informasi. Dari 4 (empat) domain diuraikan menjadi 9 (sembilan) variabel yaitu Variabel Pengorganisasian, Variabel Tugas dan Fungsi, Variabel Perencanaan, Variabel Pengembangan, Variabel Manajemen Pengadaan, Variabel Manajemen Penyedia, Variabel Manajemen Kinerja, Variabel Manajemen Risiko dan Variabel Sistem Informasi. Pada tahun 2023 ditetapkan target 6 variabel dan tercapai 8 variabel atau sebesar 133%. Permasalahan yang dihadapi terdapat pada indikator Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi, yang terdapat alokasi anggaran bersumber dana DBHCHT dimana terkait penggunaannya sudah ditentukan melalui PMK 215/PMK.07/2021 tentang penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana DBHCHT.
6. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah merupakan sasaran strategis perubahan dari meningkatnya kualitas pelayanan publik kesekretariatan daerah, dengan capaian indikator nilai SKM sebagai indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Kesekretariatan Daerah, capaian tahun 2023 sebesar 85.60 (Baik) atau sebesar 101.3% dari target yang ditetapkan, dengan status evaluasi kinerja tercapai. Faktor penunjang keberhasilan adalah adanya pembagian tugas pokok dan fungsi serta kejelasan pelaksanaan tugas antar bagian. sedang Permasalahan yang dihadapi adalah belum semua bagian melaksanakan survei, sehingga hasil penilaian belum mencerminkan kondisi sebenarnya.

Selain capaian keberhasilan/kegagalan kinerja pelayanan dari sisi pencapaian indikator kinerja sasaran, perlu diukur pula keberhasilan kinerja dari sisi keuangan, pengukuran kinerja keuangan berdasarkan kelompok belanja dan berdasarkan dan berdasarkan anggaran program yang menjadi urusan Sekretariat Daerah, secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio Realisasi Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	40,000,000	3,500,000	3,000,000	10,000,000	12,800,000	11,500,000	3,500,000	4,350,000	13,970,000	11,545,000	29	100	145	140	90	38.95	44.07
Hasil Retribusi Daerah	40,000,000	3,500,000	3,000,000	10,000,000	12,800,000	11,500,000	3,500,000	4,350,000	13,970,000	11,545,000	29	100	145	140	90	38.95	44.07
BELANJA	46,779,598,917	31,181,705,815	49,536,548,005	49,084,018,964	53,394,070,198	47,540,909,564	29,103,009,266	46,646,436,930	47,980,690,411	52,256,545,345	102	93	94	98	98	8.35	8.57
BELANJA TIDAK LANGSUNG	21,658,457,000	17,865,499,000	-	-	-	23,770,454,782	17,151,552,230	-	-	-	110	96	-	-	-	(17.51)	(27.85)
Belanja Pegawai	21,658,457,000	17,865,499,000	-	-	-	18,253,787,618	17,151,552,230	-	-	-	84	96	-	-	-	(17.51)	(6.04)
BELANJA LANGSUNG	25,121,141,917	13,316,206,815	-	-	-	23,770,454,782	11,951,457,036	-	-	-	95	90	-	-	-	(46.99)	(49.72)
Belanja Pegawai	5,762,287,000	3,530,652,500	-	-	-	5,499,987,623	3,371,479,950	-	-	-	95	95	-	-	-	(38.73)	(38.70)
Belanja Barang dan Jasa	17,611,465,917	9,366,923,315	-	-	-	16,597,538,609	8,195,235,886	-	-	-	94	87	-	-	-	(46.81)	(50.62)
Belanja Modal	1,747,389,000	418,631,000	-	-	-	1,672,928,550	384,741,200	-	-	-	96	92	-	-	-	(76.04)	(77.00)

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio Realisasi Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA OPERASI	-	-	47,904,619,190	45,392,991,553	52,776,852,595	-	-	45,068,774,580	44,386,182,978	51,647,016,795	-	-	94	98	98	8.08	8.16
Belanja Pegawai	-	-	14,233,456,903	15,223,183,032	15,962,535,536	-	-	13,322,227,644	15,063,861,093	15,572,076,188	-	-	94	99	324	2.50	121.56
Belanja Barang dan Jasa	-	-	16,617,347,287	14,389,458,521	17,021,437,059	-	-	14,872,731,936	13,582,471,885	16,366,560,607	-	-	90	94	91	9.01	7.24
Belanja Hibah	-	-	17,053,815,000	15,780,350,000	19,792,880,000	-	-	16,873,815,000	15,739,850,000	19,708,380,000	-	-	99	100	83	12.64	1.92
BELANJA MODAL	-	-	1,631,928,815	3,691,027,411	617,217,603	-	-	1,577,662,350	3,594,507,433	609,528,550	-	-	97	97	99	(40.38)	127.84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	932,710,315	2,582,206,888	293,313,550	-	-	884,142,350	2,494,478,433	287,317,550	-	-	95	97	-	176.85	182.14
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	357,400,000	885,144,963	124,054,053	-	-	356,562,000	876,509,000	122,361,000	-	-	100	99	-	147.66	145.82
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	172,384,000	177,332,000	196,250,000	-	-	168,401,000	177,217,000	196,250,000	-	-	98	100	100	5.36	5.24
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	169,434,500	46,343,560	3,600,000	-	-	168,557,000	46,303,000	3,600,000	-	-	99	100	100	(46.84)	(72.53)

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Magelang, data diolah 2023.

Nilai rata-rata pertumbuhan target PAD pada Sekretariat Daerah sebesar 38.95%, dengan nilai rata-rata pertumbuhan realisasi PAD sebesar 44.07%. Sumber PAD Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa retribusi pemakaian ruangan, retribusi pemakaian kendaraan bermotor dan retribusi pemakaian alat.

Sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan target belanja Sekretariat Daerah sebesar 8.35%, hal tersebut mencerminkan ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Magelang dalam mendukung pelaksanaan program pada Sekretariat Daerah dalam kondisi baik, sedangkan rata-rata pertumbuhan terhadap realisasi anggaran 8.57%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam 2 (dua) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya diantaranya:

Tantangan:

a. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005 senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam, sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

b. Upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*). Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang tepat atau “*right sizing*” dan optimal untuk melaksanakan fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan

kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di Kabupaten Magelang baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

c. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

d. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

e. Kebijakan Pemerintah pusat yang dinamis dan adanya ketidak harmonisan anatar kebijakan Pemerintah pusat berpengaruh pada optimalisasi kinerja Sekretariat Daerah, untuk itu perlu dilakukan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat di daerah serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah.

f. Terdapat peraturan perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak selaras dengan perkembangan kebutuhan di daerah, sehingga perlu melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah.

g. Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang profesional dan handal; Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan

efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

h. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

i. Pengadaan Barang dan Jasa

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang, selain kompleksitas aturan dalam proses pengadaan barang dan jasa, jumlah barang yang perlu diproses pengadaannya juga semakin meningkat, serta transformasi digital pengadaan barang dan jasa sehingga perlu adanya lembaga dan sumberdaya yang cukup dan kompeten dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

j. Pengembangan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan

Keterbukaan publik dan pelayanan terhadap keprotokolan menjadi tuntutan dalam pelayanan kedinasan, sehingga informasi pelaksanaan kedinasan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

k. Pengembangan perekonomian

Pengembangan perekonomian yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan perlu terus dikembangkan dan difasilitasi, baik pada pengembangan kelembagaan, permodalan maupun pengembangan sumber daya manusianya agar dapat bersaing dalam perekonomian global era 5.0.

- l. Pengembangan BUMD
Pengembangan BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu terus dikembangkan agar dapat bersaing dalam era persaingan global dan terus berkembang dalam pengelolaan kekayaan daerah.
- m. Pengendalian pembangunan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan terhadap jalannya pembangunan, untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.
- n. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyusunan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat perlu ditindaklanjuti dalam bentuk aturan yang terkoordinasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Peluang:

Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah adalah:

- a. Adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan seluruh OPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi;
- b. Adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan daerah;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dapat dihimpun sebagai bahan perumus kebijakan;
- d. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi;
- e. Adanya bantuan arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten;
- i. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi;
- j. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan memungkinkan dukungan positif bagi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan;
- k. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- l. Tingginya kebutuhan jumlah pengadaan barang/jasa dan adanya system yang terbangun menjadi peluang dalam memperoleh barang/jasa yang berkualitas.
- m. Pengembangan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
Keterbukaan informasi memberikan peluang memberikan informasi hasil pembangunan kepada masyarakat.
- n. Pengembangan perekonomian

Era persaingan global 5.0 yang saat ini sudah mulai berjalan menjadi peluang dalam pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kerakyatan

o. Pengembangan BUMD

Potensi dan letak geografis Kabupaten Magelang menjadi peluang dalam pengembangan BUMD, dengan mengembangkan unit usaha yang bernilai ekonomi tinggi.

p. Pengendalian pembangunan

Pengendalian pembangunan secara berkala dapat mencegah timbulnya potensi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

q. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Terdapat peraturan dan instrumen lainnya sehingga dapat dijadikan dasar dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk memenuhi harapan diatas, maka akan dioptimalkan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Kabupaten Magelang sebagai Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan dan Non Urusan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Identifikasi permasalahan melalui analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis, yang menjadikan dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan pembangunan yang mengawali analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang menentukan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 2025-2026.

Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- 1) Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah;
- 2) Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah;
- 5) Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;
- 6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 7) Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui adanya permasalahan terkait tugas dan fungsi maka dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Belum optimalnya perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Belum Optimalnya Administrasi Tata Pemerintahan
			Belum optimalnya Fasilitasi Kerjasama Daerah
			Belum optimalnya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2	Belum optimalnya kualitas kebijakan ekonomi dan Pembangunan	Belum optimalnya perumusan kebijakan Perekonomian dan pembangunan	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi evaluasi kebijakan perekonomian
			Belum optimalnya pemantauan kebijakan terkait SDA
			Belum optimalnya pengelolaan Administrasi Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan
			Belum optimalnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaku pengadaan barang/jasa
3	Belum optimalnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Belum optimalnya kualitas urusan pemerintahan daerah dibidang penataan organisasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum kesekretariatan daerah	Belum optimalnya penataan organisasi
			Belum optimalnya layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
			Belum optimalnya Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Belum optimalnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Belum Optimalnya Pelaksanaan admnistrasi kepegawaian yang dilaksanakan
			Belum optimalnya administrasi umum perangkat daerah
			Belum optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Belum optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Belum optimalnya pemeliharaan BMD milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
			Belum optimalnya pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
			Belum optimalnya fasilitasi kerumahtanggaan Kesekretariatan Daerah

Terdapat 3 (tiga) masalah pokok yang dihadapi Sekretariat Daerah, hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan, masalah pokok tersebut yaitu: 1. Belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat, dalam menjalankan fungsi tersebut dijalankan oleh 3 (tiga) bagian, yaitu: Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, 2. Belum optimalnya kualitas kebijakan ekonomi dan Pembangunan, permasalahan tersebut sesuai fungsinya dijalankan oleh 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Administrasi Pembangunan Daerah, Bagian Perekonomian dan SDA, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 3. Belum optimalnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah, permasalahan tersebut sesuai dengan fungsi Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Organisasi dalam memberikan pelayanan kepada Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta fungsi pelayanan publik pada Sekretariat Daerah.

3.2 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Telaah Renstra Kementerian yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan Sekretariat Negara. Sedangkan telaah terhadap Renstra Provinsi dilakukan terhadap Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1. Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

a. Telaah Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Strategis pada Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024 yang terkait dengan Renstra Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- 1). Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;
 - 2). Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;
 - 3). Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;
 - 4). Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;
 - 5). Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;
 - 6). Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan,
- b. Telaah Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB)

Sasaran Strategis Kementerian PAN dan RB tahun 2020-2024 untuk Tujuan “Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing” sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi;
 - 2) Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera;
 - 3) Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel;
 - 4) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas;
 - 5) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;
 - 6) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional.
- c. Telaah Kementerian Sekretariat Negara
- Sasaran strategis Kementerian Sekretariat Negara tahun 2020-2024 untuk Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Peningkatan Kualitas SDM Aparatur di Kementerian Sekretariat Negara” sebagai berikut:
- 1) Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi;
 - 2) Pengendalian internal yang efektif;
 - 3) Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;
 - 4) Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Menelaah Rencana Strategis Kementrian Sekretariat Negara, Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang juga mempunyai peran membantu bupati dalam hal:

- 1) Menyusun dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah;
- 2) Menyenggarakan kegiatan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat dan layanan pengadaan; dan
- 3) Menyenggarakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

3.2.2. Telaah Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut:

- 1). Peningkatan Sinergitas Kebijakan Daerah,
- 2). Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
- 3). Peningkatan Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.

Berdasarkan telaah diatas maka Renstra Kementerian yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Setda Provinsi Jawa Tengah Terkait Dengan Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah.

No	Kemendagri	Kemenpan RB	KemenSetneg	Setda Prov. Jateng
1	2	3		4
1	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia;	Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi	Transformasi kelembagaan yang berkelanjutan dengan mengedepankan debirokratisasi, deregulasi, dan digitalisasi.	Peningkatan Sinergitas Kebijakan Daerah,
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah;	Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera;	Pengendalian internal yang efektif;	Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri;	Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Efektif dan Akuntabel	Pengelolaan kinerja dan anggaran yang berkualitas dan akuntabel;	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah.
4	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah;	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas;	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.	
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif;	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;		

No	Kemendagri	Kemenpan RB	KemenSetneg	Setda Prov. Jateng
1	2	3		4
6	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan,	Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional.		

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Posisi Komplek Sekretariat Daerah merupakan kawasan kawasan perkotaan, dimana wilayah kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi. Kota Mungkid sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Magelang dan merupakan pusat perkantoran Sekretariat Daerah sebagai kawasan perkotaan Mungkid, sebagaimana diatur dalam pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Magelang disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang secara materiil dan moril.

Rencana Struktur Ruang Sekretariat Daerah berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Komplek Sekretariat Daerah merupakan kawasan Pengembangan PPL sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) huruf a
2. Pendukung pusat pertumbuhan Komplek Sekretariat Daerah dengan prioritas sebagai pusat kawasan perkantoran yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang,

3. Pengembangan Kelurahan Sawitan dimana Komplek Sekretariat Daerah berada sebagai kawasan perkantoran. Serta Rencana Pola Ruang Komplek Sekretariat Daerah pada wilayah Kelurahan Sawitan Kecamatan Mungkid meliputi:
- Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan sebagai mana diatur dalam pasal 47 ayat (1) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf a, salah satunya adalah a. Kawasan Perkotaan Mungkid. Dalam penjelasan peraturan Bupati Kota Mungkid sebagai pusat administrasi pemerintahan Kabupaten, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian. Dalam pasal 47 ayat (4) Pusat pertumbuhan Kota Mungkid, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Salaman dan Tempuran.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan pada KLHS mengacu pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB) yang ditetapkan dalam SDG’s. Pilar Hukum dan Tata Kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan ke 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, dengan isu strategi target pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai adalah: Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Penggunaan *e-procurement* terhadap belanja pengadaan dan Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.

Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola ini tidak memiliki atau tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang. Berikut adalah rumusan isu strategis TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola di Kabupaten Magelang, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Isu Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan

TPB Pilar Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan	Isu Strategis dari Target TPB belum tercapai, belum menjadi target, belum ada data	Isu Strategis terkait Kondisi Lingkungan Hidup
Tujuan 16: Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Isu Strategis: a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) b. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan. c. Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.	Tidak ada, karena tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup

Tabel 3.4.
Telaah RTRW dan KLHS pada RPD terkait Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025 - 2026

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
I	RTRW				
A	Pola Ruang Struktur RTRW				
	Berdasarkan matrik indikasi program utama RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 pada lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 tidak terdapat program indikatif yang terkaid dengan Sekretariat Daerah	Tugas Sekretariat Daerah: Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Fungsi Sekretariat Daerah: 1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Daerah; 2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah; 4. Pelayanan administratif, data, dan informasi kesekretariatan daerah; 5. Pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; 6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah; 7. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat Daerah; 8. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.	1. Belum optimalnya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik	1. Adanya kebijakan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. 2. Perbaikan pelaksanaan pelayanan publik	1. Komitmen dan dukungan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan akuntabilitas. Masih kurang. 2. Budaya kerja yang masih rendah

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
B	Struktur Ruang RTRW 1. Sebagai kawasan Pengembangan PPL sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) huruf a 2. Pendukung pusat pertumbuhan Komplek Sekretariat Daerah dengan prioritas sebagai pusat kawasan perkantoran yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang, 3. Pengembangan kawasan perkantoran.		1. Keterbatasan Perkantoran Sekretariat Daerah.	Adanya masterplant penataan perkantoran di Kota Mungkid	Terbatasnya ketersediaan lahan
II KLHS					
A	Permasalahan dan isu strategis Pilar 16 SDG's: Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) b. Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.	a. Terbangunnya sistem akuntabilitas yang terintegrasi b. Telah terbentuknya UKPBJ dengan SDM yang kompeten. c. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan telah tercapai sejak tahun 2020 d. Adanya komitmen dan team reformasi birokrasi	a. Rendahnya komitmen dan pemahaman perangkat daerah tentang akuntabilitas b. Pemahaman reformasi birokrasi yang masih kurang
B	Skenario dan Rekomendasi	Tidak ada, karena tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup	Tidak ada, karena tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup	-	-

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah terdapat beberapa Isu strategis terkait dengan isu strategis pembangunan global, nasional dan daerah, meliputi isu-isu:

1. Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis terdiri dari isu strategis pada tatanan global, nasional maupun daerah yang terdiri dari:

a. SDG's (*Sustainable Development Goals*)

Dengan berakhirnya MDG's (*Milenium Development Goals*) pada tahun 2015 maka ditetapkan SDG's (*Sustainable Development Goals*) sebagai pengembangan dan tindak lanjut pelaksanaan MDG's yang membahas isu-isu pembangunan internasional. Terkait permasalahan pembangunan daerah di Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, terdapat 1 (satu) isu pembangunan yaitu “mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan”.

b. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan dan pelayanan sistem pemerintahan untuk mengimbangi tuntutan pelayanan terhadap masyarakat dari semua lini kehidupan termasuk perkembangan teknologi dan informasi serta industri dan perekonomian yang melaju pesat. Era industri 5.0 harus disambut dengan penataan fungsi kebijakan dan pelayanan dari lembaga pemerintahan sampai ke tingkat daerah, sehingga tidak tertinggal terhadap pesatnya perkembangan teknologi.

2. Lingkungan Nasional

Agenda Reformasi Birokrasi lima tahun ketiga (2020-2024) mengamatkan pelaksanaan: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisien dan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas, hal ini menuntut pelaksanaan dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat di tiap daerah untuk mewujudkan agenda reformasi birokrasi tersebut. Pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun ketiga (2020-2024) merupakan peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi pada lima tahun kedua, untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia.

3. Lingkungan Provinsi

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Sampai dengan tahun 2022, nilai AKIP Kabupaten Magelang adalah B (62,29) dari target B (67,01), hal ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga kedepan perlu dipacu dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten sejajar Provinsi Jawa Tengah dan bahkan melampaui Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota.

4. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Magelang dirumuskan berdasarkan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah masa yang lalu, khususnya terkait dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki. Permasalahan pembangunan juga diidentifikasi dari seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang ingin dicapai di masa datang yang didasarkan pada kondisi riil saat ini.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama, sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Tata kelola pemerintahan yang baik berprinsip pada: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, transparansi, dan responsif. Regulasi yang mengatur mengenai tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia diatur di dalam UU Pelayanan Publik, UU Administrasi Pemerintahan, dan UU Etika Penyelenggara Negara. Berdasarkan sejarahnya, *good governance* diterapkan sejak dimulainya era reformasi yang dimana pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam sistem pemerintahan, termasuk di Kabupaten Magelang.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Magelang. Hal tersebut juga sesuai dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan dengan strategi Meningkatnya pelaksanaan pelayanan publik dengan dengan salah satu arah kebijakan RPD 2024-2026 Kabupaten Magelang yaitu Meningkatkan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Dalam mencapai arah kebijakan itu, maka diperlukan: 1) Meningkatnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) didukung oleh aparatur daerah yang profesional, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 2) Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, ditunjang dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat dan meningkatnya hubungan kerjasama yang saling

menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; 3). Berkembangnya sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat yang mandiri, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat berbagai kendala yang perlu untuk dihadapi dan diselesaikan. Kendala yang pertama adalah membenahi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang belum optimal. Akuntabilitas kinerja menunjukkan seberapa kinerja pemerintah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang menjadi persoalan tersendiri, mengingat terdapat beberapa hal yang masih belum mencapai standar atau target yang telah ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang belum berjalan dengan optimal. Sistem tersebut dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu aspek perencanaan, pelaporan implementasi, dan monitoring dan evaluasi (monev). Kendala utama yang dihadapi dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas kinerja yang optimal terletak pada indikator-indikator perencanaan yang belum sinkron dan terukur. Indikator yang sinkron dan terukur menjadi penting dalam tahapan-tahapan sistem pemerintahan karena indikator tersebut menunjukkan keterkaitan antar tahapan dan keterukuran proses perencanaan hingga pengawasan program atau kegiatan. Apabila indikator suatu program dapat tersinkronisasi dan terukur, maka dapat tercipta pelayanan publik yang baik karena tujuan dari program tersebut menjadi lebih jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya indikator yang baik, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Magelang akan menjadi belum optimal yang dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Magelang.

Sistem manajemen pemerintahan merupakan suatu bentuk inovasi birokrasi yaitu dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengorganisasikan SDM. Dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut, maka proses pengelolaan SDM akan menjadi lebih mudah. Pengelolaan SDM dengan memanfaatkan teknologi informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai dalam rangka pelayanan publik. Saat ini pengembangan sistem manajemen kepegawaian Kabupaten Magelang masih belum optimal.

Lemahnya pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kabupaten Magelang juga mengindikasikan belum optimalnya pelayanan publik sebagai bentuk supremasi hukum. Suatu perda disusun sebagai sebuah regulasi yang bersifat mengikat dan bertujuan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di suatu wilayah. Penegakan perda harus didukung oleh komitmen pemerintah daerah yang kuat dan kerjasama lintas sektoral. Komitmen pemerintah daerah dapat diwujudkan dengan terus memfasilitasi pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas penegakan perda. Sedangkan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder bertujuan untuk terbentuknya kesepakatan terkait peraturan-peraturan yang sudah disepakati sehingga pelanggaran perda dapat diminimalisasi. Saat ini, komitmen pemerintah Kabupaten Magelang dalam penegakan perda masih belum optimal, mengingat masih adanya otoritas penegak perda yang belum difasilitasi dengan baik dan komunikasi pihak-pihak terkait penegakan perda masih belum optimal. Apabila penegakan perda dapat berjalan dengan baik, maka pelayanan publik di Kabupaten Magelang menjadi lebih optimal karena ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kondusif.

Smart City di era 5.0 sudah merupakan tuntutan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan publik, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat, solusi bagi permasalahan masyarakat, publikasi potensi daerah, dan percepatan pembangunan.

Isu-isu Strategis Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Pemetaan Isu-isu Strategis Pembangunan Global, Nasional dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJPN 2025-2045)	Isu Strategis RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026	Isu Strategis KLHS RPD Kab. Magelang 2025- 2026	Isu Strategis RPD Kab. Magelang 2025- 2026
1	2	3	4	5
Isu ke 15 Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu ke 3 Mewujudkan Transformasi dan Tata kelola	Isu ke 4 Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Isu ke 21 Penegakan hukum dan kebebasan sipil; serta peningkatan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Isu ke 4 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap visi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Dalam rangka mencapai memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, maka ditetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah sebagai berikut:

A. Tujuan

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan.

- Indikator tujuan:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), indikator tujuan mengadopsi indikator Sasaran RPD.

- Alasan pemilihan indikator tujuan adalah: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem AKIP merupakan satu rangkaian siklus manajemen yang meliputi: perencanaan kinerja, perencanaan program/kegiatan, penyusunan anggaran, pelaksanaan Program/kegiatan, pengukuran dan pelaporan keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja, dan pelaksanaan evaluasi internal.

- Formulasi penghitungan indikator tujuan: Nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi mengacu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- Satuan: -

2. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

indikator tujuan mengadopsi indikator Sasaran RPD.

- Alasan pemilihan indikator tujuan adalah: Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan indikator yang

digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi. IKM dihitung melalui perbandingan antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pengalaman dan persepsinya setelah menerima pelayanan tersebut. Dalam hal ini, IKM mencerminkan sejauh mana pelayanan publik memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta dapat memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi

- Formulasi penghitungan indikator tujuan: Nilai IKM mengacu Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ((Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang).
- Satuan: -

B. Sasaran

1. Sasaran1: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Indikator sasaran: Cakupan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
 - Alasan pemilihan indikator sasaran adalah: Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat merupakan ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
 - Formulasi penghitungan indikator sasaran: (Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang tersusun/Jumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang seharusnya)x100%
 - Satuan: Persen
2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan.
 - Indikator sasaran: Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan
 - Alasan pemilihan indikator sasaran adalah: perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan merupakan ukuran keberhasilan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
 - Formulasi penghitungan indikator sasaran: (Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang

tersusun/Jumlah perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan yang seharusnya)x100%.

- Satuan: Persen

3. Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Kesekretariatan Daerah.

- Indikator sasaran: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Alasan pemilihan indikator sasaran adalah: Nilai SKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
- Formulasi penghitungan indikator sasaran: Hasil Survei Kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Rumus: $((\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur} / \text{Total unsur yang terisi}) \times \text{Nilai Penimbang})$
- Satuan: -

Secara terperinci tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran		Kondisi Akhir Kinerja
				2022	2023	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan		Nilai AKIP	62.25 (Baik)	63.04 (Baik)	64.31 (Baik)	64.95 (Baik)	64.95 (Baik)
1.1		Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	103.53	101.3	100	100	100
1.2		Meningkatnya kualitas kebijakan ekonomi dan pembangunan	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90	111	100	100	100
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36 (Baik)	84.78 (Baik)	84.92 (Baik)	85.20 (Baik)	85.20 (Baik)
1.1		Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.35 (Baik)	85.60 (Baik)	86.50 (Baik)	87.50 (Baik)	87.50 (Baik)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Dalam menjalankan tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan yang perlu diambil, sehingga target capaian kinerja yang ditetapkan lebih terarah, dapat dicapai dan terukur.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta diturunkan dalam kebijakan dan program kegiatan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun.

Rumusan strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan	1 Meningkatkan kualitas kebijakan penyelenggaraa n pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	1.1 Mengoptimalkan perumusan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	1.1.1 Peningkatan Administrasi Tata Pemerintahan
			1.1.2 Peningkatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
			1.1.3 Optimalisasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
			1.1.4 Optimalisasi Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	2 Meningkatkan kualitas kebijakan	2.1 Mengoptimalkan perumusan kebijakan perekonomian	2.1.1 Peningkatan fasilitasi dan koordinasi evaluasi kebijakan perekonomian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	perekonomi dan Pembangunan	dan pembangunan	2.1.2 Peningkatan pemantauan kebijakan terkait SDA
			2.1.3 Peningkatan pengelolaan Administrasi Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Pembangunan
			2.1.4 Peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa
	3 Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	3.1 Meningkatkan kualitas urusan pemerintahan daerah dibidang penataan organisasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, administrasi umum kesekretariatan daerah	3.1.1 Optimalisasi penataan organisasi
			3.1.2 Peningkatan layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan
			3.1.3 Optimalisasi Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			3.1.4 Optimalisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			3.1.5 Optimalisasi Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan
			3.1.6 Optimalisasi administrasi umum perangkat daerah
			3.1.7 Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			3.1.8 Optimalisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			3.1.9 Optimalisasi pemeliharaan BMD milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
			3.1.10 Peningkatan pengadministrasian keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3.1.11 Peningkatan fasilitasi kerumahtanggan Kesekretariatan Daerah

Berdasarkan tabel diatas dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis. Strategi yang diambil dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut sebanyak 3 (tiga) strategi ditunjang dengan 19 (sembilan belas) arah kebijakan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikatif pendanaan serta indikator dan target kinerja yang akan dicapai. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikatif pendanaan serta indikator dan target kinerja yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dalam bentuk Program pembangunan Daerah. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Pendanaan indikatif merupakan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk mencapai target keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditentukan.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

Nama Sub Kegiatan, kegiatan, program dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 mengacu Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 terdiri dari:

Tabel 6.0
 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Renstra Sekretariat Daerah
 Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output)dan Sub Kegiatan
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD
		Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
		Prosentase ketercapaian penataan organisasi
		Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan komunikasi pimpinan
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum
1.4.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
1	2	3
1.4.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
1.5.1	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.6.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
1.6.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.6.4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.7	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya
1.7.3	Pemeliharaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
1.7.4	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
1.7.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1.8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
1	2	3
1.8.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.8.2	Penyediaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH/WKDH	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan
1.8.3	Pelaksanaan medical checkup KDH dan WKDH	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.8.4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.9.1	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah
1.9.2	Penyediaan Kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah
1.10	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi
1.10.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
1.10.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
1.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
1.10.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
1.10.5	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
1.11.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan
1.11.1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
1.11.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi Pimpinan
1.11.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
2.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
1	2	3
		Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah
		Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan
2.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan yang tersusun
2.1.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah
2.1.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan Administrasi Pemerintah
2.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
2.2	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama yang tersusun
2.2.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri
2.3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
2.3.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun
2.3.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum
2.3.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi
2.4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
2.4.1	Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.4.2	Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB
2.4.3	Evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
1	2	3
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi
		Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)
3.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun
3.1.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang tersusun
3.1.3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang tersusun
3.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang tersusun
3.2	Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam
3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja yang tersusun
3.2.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang tersusun
3.2.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan yang tersusun
3.3	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Administrasi pembangunan
3.3.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan
1	2	3
3.3.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
3.3.3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3.4	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya
3.4.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
3.4.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.4.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan tabel diatas untuk pencapaian tujuan dan sasaran didukung sebanyak 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja hasil/*outcome*, dijabarkan dalam 19 (sembilan belas) kegiatan dengan 19 (sembilan belas) indikator keluaran/*ouput* dan 57 (lima puluh tujuh) sub kegiatan dengan 57 (lima puluh tujuh) indikator keluaran.

Total anggaran sampai dengan akhir periode Renstra sebesar Rp. 69.979.516.906,00 (Enam puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu sembilan ratus enam rupiah), secara detail rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 sebagaimana terlampir pada lampiran 1 Tabel 6.1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan pada Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja merupakan tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu Sub Kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026, indikator sasaran pada RPD diadopsi menjadi tujuan pada Renstra, demikian juga pada penentuan target pada indikator tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan memastikan agar setiap tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam RPD selaras dengan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Indikator tujuan pada Renstra merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yang mengacu pada indikator sasaran RPD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah bidang urusan mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025-2026, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capain Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
		2022	2023	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan					
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	62.25 (Baik)	63.04 (Baik)	64.31 (Baik)	64.95 (Baik)	64.95 (Baik)
1.1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat					
	Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	103,53	101.3	100	100	100
1.1.2	Meningkatnya kualitas kebijakan ekonomi dan Pembangunan					

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun		Kondisi Akhir Kinerja
		2022	2023	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90	111.00	100	100	100
1.2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36 (Baik)	84.78 (Baik)	84.92 (Baik)	85.20 (Baik)	85.20 (Baik)
1.2.1	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah					
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.35 (Baik)	85.60 (Baik)	86.50 (Baik)	87.50 (Baik)	87.50 (Baik)

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah tahun 2023, data diolah

Untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran strategis dengan masing-masing 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang dijabarkan dalam 2 (dua) tahun capaian.

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) merupakan indikator kinerja tujuan Sekretariat Daerah yang pertama dengan target akhir periode Renstra dengan nilai 64.95 dengan kategori Baik. Indikator sasaran terdiri dari Capaian peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan target akhir Renstra 100%, Capaian perumusan kebijakan ekonomi dan pembangunan dengan target akhir Renstra 100%.

Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator tujuan Sekretariat Daerah yang kedua dengan sasaran strategis nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai target akhir Renstra 87.50 (Baik).

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran terhadap program yang diusulkan dapat dilihat pada program dan indikator program yang mendukung ketercapaian sasaran dan tujuan pada RPD.

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPD tahun 2025-2026, secara rinci dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.2
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran
 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan					
1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	62.25 (Baik)	64.03 (Baik)	64.31 (Baik)	64.95 (Baik)	64.95 (Baik)
1.1.1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat					
	Cakupan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	103.54	101.03	100	100	100
1.1.1.1	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	100	100	100	100	100
1.1.1.2	Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	110.61	103.08	100	100	100
1.1.1.3	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	100	100	100	100	100
1.1.2	Meningkatnyanya perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan					
	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90	111	100	100	100
1.1.2.1	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100	100	100	100	100
1.1.2.2	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100	100	100	100	100

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2025	2026	
1.1.2.3	Tingkat Kematangan UKPBJ.	Level 3 (4/9) level Progress	level 3 (8/9) level Progress	NA	NA	NA
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	52.2 Cukup	74.41 Baik	78 Baik	80 Baik	80 Baik
1.2	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36 (Baik)	84.78 (Baik)	84.92 (Baik)	85.20 (Baik)	85.20 (Baik)
1.2.1	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah					
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84.35 (Baik)	85.60 (Baik)	86.50 (Baik)	87.50 (Baik)	87.50 (Baik)
1.2.1.1	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100
1.2.1.2	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100	100	100	100	100
1.2.1.3	Persentase ketercapaian penataan organisasi	100	100	100	100	100
1.2.1.4	Cakupan Kinerja Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100	100	100
1.2.1.5	Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	100	83.33	100	100	100

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Tahun 2023, Data diolah.

Berdasarkan tabel tersebut indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPD didukung dengan 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) program beserta indikator kinerja yang diukur pada setiap tahunnya.

Untuk mengetahui keterkaitan antar tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta indikator didalamnya dalam bentuk turunan yang saling terkait dan menunjang, maka digambarkan dalam bentuk *cascading* indikator sebagaimana pada tabel 7.3 lampiran

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Magelang serta regulasi lainnya yang masih berlaku. Oleh karena itu, rumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program kerja, pendanaan dan indikator keberhasilannya diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 berpedoman pada RPD yang disusun untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah pada masa transisi pergantian Kepala Daerah. Dalam pelaksanaannya dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2026 diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi salah satu pedoman serta acuan sehingga dapat memfasilitasi dalam implementasi berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Kabupaten Magelang.

Selanjutnya, dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dan 2026.

Kota Mungkid, 26 Januari 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Drs. ADI WARYANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 19660304 199203 1 007

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2022		Tahun 2023										
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan				Nilai AKIP	62.25	-	63.04	-		64.31	-	64.95	-	64.95	-		
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78			84.92		85.2		85.2			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	197,591,888	100 persen	275,935,570	100 persen	61,491,196	100 persen	61,491,196	100 persen	122,982,392	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
				2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100 persen	19,854,055	100 persen	19,885,815	100 persen	12,000,000	100 persen	12,000,000	100 persen	24,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	7 kegiatan	19,854,055	7 kegiatan	19,885,815	7 kegiatan	12,000,000	7 kegiatan	12,000,000	7 kegiatan	24,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	19,854,055	7 dokumen	19,885,815	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	12,000,000	24 Dokumen	24,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3 layanan	152,101,000	1 Layanan	241,130,000	3 layanan	40,000,000	3 layanan	40,000,000	3 layanan	80,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134 Laporan	152,101,000	200 laporan	241,130,000	12 Laporan	40,000,000	12 Laporan	40,000,000	24 Laporan	80,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 paket	25,663,638	1 paket	15,000,000	2 paket	10,000,000	2 paket	10,000,000	4 paket	20,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25,663,638	1 unit	15,000,000	2 Unit	10,000,000	2 Unit	10,000,000	4 Unit	20,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 layanan	9,827,250	3 layanan	9,835,570	1 layanan	6,491,196	1 layanan	6,491,196	1 layanan	12,982,392			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,827,250	12 laporan	9,835,570	12 Laporan	6,491,196	12 Laporan	6,491,196	24 Laporan	12,982,392	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 unit	10,000,000	15 unit	9,970,000	25 unit	5,000,000	25 unit	5,000,000	50 unit	10,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	10,000,000	40 unit	9,970,000	25 Unit	5,000,000	25 Unit	5,000,000	50 Unit	10,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
				Nilai AKIP	62.25	-	63.04	-		64.31	-	64.95	-	64.95	-		
				Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	100 Persen	676,418,242	100 Persen	855,186,710	100 persen	340,000,000	100 persen	340,000,000	100 persen	680,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan yang dijalankan	100 persen	676,418,242	100 Persen	855,186,710	100 persen	340,000,000	100 persen	340,000,000	100 persen	680,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan yang tersusun	3 dokumen	604,016,162	3 dokumen	775,735,012	3 dokumen	320,000,000	3 dokumen	320,000,000	6 dokumen	640,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1 dokumen	49,596,580	2 dokumen	97,998,215	4 dokumen	100,000,000	3 dokumen	100,000,000	7 dokumen	200,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengolaan Administrasi Pemerintah	1 Dokumen	385,730,717	11 dokumen	463,235,992	14 Dokumen	120,000,000	14 Dokumen	120,000,000	28 Dokumen	240,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Dokumen	168,688,865	5 dokumen	214,500,805	3 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	100,000,000	6 Dokumen	200,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerja sama yang tersusun	35 dokumen	72,402,080	22 Naskah kerjasama	79,451,698	35 dokumen	20,000,000	35 dokumen	20,000,000	70 dokumen	40,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerjasama Dalam negeri	35 dokumen	72,402,080	22 dokumen	79,451,698	35 dokumen	20,000,000	35 dokumen	20,000,000	70 dokumen	40,000,000	BAGIAN PEMERINTAHAN	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			
	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,35 (Baik)		85,60 (Baik)		86,50 (Baik)		87,50 (Baik)		87,50 (Baik)			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian penataan organisasi	100 persen	288,651,450	100 persen	289,580,704	100 persen	231,600,000	100 persen	256,600,000	100 persen	488,200,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
	2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah			100 persen	54,154,250	100 persen	60,367,227	100 persen	85,000,000	100 persen	60,000,000	100 persen	145,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG	
	3. Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	4,345,640	100 persen	4,345,400	100 persen	5,000,000	100 persen	5,000,000	100 persen	10,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	5 Kegiatan	4,345,640	5 Kegiatan	4,345,400	6 kegiatan	5,000,000	6 kegiatan	5,000,000	6 kegiatan	10,000,000		
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Laporan	4,345,640	NA	NA								
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	12 dokumen	4,345,400	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	24 Dokumen	10,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3 Layanan	43,331,000	1 Layanan	49,739,427	2 layanan	50,000,000	2 layanan	50,000,000	2 layanan	100,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 perjalanan	43,331,000	50 Laporan	49,739,427	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	24 Laporan	100,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	0 paket	-	0 paket	-	1 paket	25,000,000	paket	0	1 paket	25,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 paket		0 unit	-	4 Unit	25,000,000	Unit	0	4 Unit	25,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	5,686,250	1 layanan	5,657,800	1 layanan	5,000,000	1 layanan	5,000,000	1 layanan	10,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1237 surat	5,686,250	12 laporan	5,657,800	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,000,000	24 Laporan	10,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 unit	5,137,000	9 unit	4,970,000	8 unit	5,000,000	8 unit	5,000,000	16 unit	10,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	5,137,000	9 unit	4,970,000	8 Unit	5,000,000	8 Unit	5,000,000	16 Unit	10,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi	3 dokumen	288,651,450	1 dokumen	289,580,704	3 Dokumen	231,600,000	3 Dokumen	256,600,000	6 Dokumen	488,200,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	98,309,610	2 dokumen	91,586,935	2 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	90,000,000	4 Dokumen	165,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	34,654,825	2 Laporan	40,265,374	1 laporan	26,600,000	1 laporan	26,600,000	2 laporan	53,200,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 dokumen	54,369,535	3 dokumen	55,392,624	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	100,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	163 UPP	51,442,045	1 dokumen	54,627,031	1 dokumen	40,000,000	1 dokumen	45,000,000	2 dokumen	85,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0002.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 dokumen	49,875,435	3 dokumen	47,708,740	3 Dokumen	40,000,000	3 Dokumen	45,000,000	6 Dokumen	85,000,000	BAGIAN ORGANISASI	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	191,929,760	100 persen	176,441,355	100 persen	125,000,000	100 persen	125,000,000	100 persen	250,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
				2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan PD	100 persen	9,965,255	100 persen	9,085,795	100 persen	12,000,000	100 persen	12,000,000	100 persen	24,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	5 kegiatan	9,965,255	5 kegiatan	9,085,795	6 kegiatan	12,000,000	6 kegiatan	12,000,000	6 kegiatan	24,000,000		
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 laporan	9,965,255	NA	NA								
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	12 dokumen	9,085,795	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	12,000,000	24 Dokumen	24,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3 layanan	74,958,040	3 layanan	74,833,705	3 layanan	80,000,000	3 layanan	80,000,000	3 layanan	160,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 kali	74,958,040	50 laporan	74,833,705	12 Laporan	80,000,000	12 Laporan	80,000,000	24 Laporan	160,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 paket	102,740,000	2 paket	87,373,550	2 paket	30,000,000	2 paket	30,000,000	4 paket	60,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 paket	102,740,000	2 unit	87,373,550	4 Unit	30,000,000	4 Unit	30,000,000	8 Unit	60,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	7,584,720	1 layanan	7,539,100	1 layanan	8,000,000	1 layanan	8,000,000	1 layanan	16,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000 surat	7,584,720	12 laporan	7,539,100	12 Laporan	8,000,000	12 Laporan	8,000,000	24 Laporan	16,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	6,647,000	10 unit	6,695,000	7 unit	7,000,000	7 unit	7,000,000	14 unit	14,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	6,647,000	10 unit	6,695,000	7 Unit	7,000,000	7 Unit	7,000,000	14 Unit	14,000,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
				Nilai AKIP	62.25 -		63.04 -		64.31 -		64.95 -		64.95 -			
	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat			Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	100 Persen	1,044,833,295	100 Persen	1,167,331,930	100 persen	459,434,662	100 persen	459,434,662	100 persen	918,869,324		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan penyusunan produk hukum daerah, penanganan permasalahan hukum dan pendokumentasian produk hukum daerah	110.61 persen	842,938,280	103.08 persen	981,804,780	100 persen	322,434,662	100 persen	322,434,662	100 persen	644,869,324	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 dokumen	842,938,280	3 dokumen	981,804,780	3 Dokumen	322,434,662	3 Dokumen	322,434,662	6 Dokumen	644,869,324		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2 dokumen	274,095,055	602 dokumen	249,798,840	400 Dokumen	107,634,662	400 Dokumen	107,634,662	800 Dokumen	215,269,324	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	38 konsep	291,344,350	117 kasus	316,449,520	67 Kasus	107,400,000	67 Kasus	107,400,000	134 Kasus	214,800,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0003.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	66 dokumen	277,498,875	66 dokumen	415,556,420	66 Dokumen	107,400,000	66 Dokumen	107,400,000	132 Dokumen	214,800,000	BAGIAN HUKUM	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	129,116,158	100 persen	118,258,591	100 persen	101,452,281	100 persen	101,452,281	100 persen	202,904,562	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
				2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	100 persen	5,830,190	100 persen	5,791,225	100 persen	5,832,240	100 persen	5,832,240	100 persen	11,664,480	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	6 kegiatan	5,830,190	6 Kegiatan	5,791,225	7 kegiatan	5,832,240	7 kegiatan	5,832,240	7 kegiatan	11,664,480		
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	5,830,190	NA	NA								
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	12 Dokumen	5,791,225	12 Dokumen	5,832,240	12 Dokumen	5,832,240	24 Dokumen	11,664,480	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 layanan	59,618,358	2 Layanan	79,427,341	3 layanan	72,320,281	3 layanan	77,320,281	3 layanan	149,640,562	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68 Laporan	57,780,808	68 Laporan	77,593,141	12 Laporan	72,320,281	12 Laporan	77,320,281	24 Laporan	149,640,562		
		4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang tersusun	300 Dokumen	1,837,550	8 Dokumen	1,834,200								
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 paket	58,056,000	2 Paket	29,700,000	1 paket	20,000,000	1 paket	15,000,000	2 paket	35,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	58,056,000	2 Unit	29,700,000	2 Unit	20,000,000	2 Unit	15,000,000	4 Unit	35,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	5,441,800	1 Layanan	3,131,550	1 layanan	3,132,000	1 layanan	3,132,000	1 layanan	6,264,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,441,800	12 Laporan	3,131,550	12 Laporan	3,132,000	12 Laporan	3,132,000	24 Laporan	6,264,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 unit	6,000,000	14 Unit	5,999,700	12 unit	6,000,000	12 unit	6,000,000	24 unit	12,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	6,000,000	14 Unit	5,999,700	12 Unit	6,000,000	12 Unit	6,000,000	24 Unit	12,000,000		
				Nilai AKIP	62.25 -		63.04 -		64.31 -		64.95 -		64.95 -			
	Meningkatnya kualitas kebijakan ekonomi dan pembangunan			Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90 persen		111 Persen	437,239,446	100 persen	414,851,976	100 persen	414,851,976	100 persen	829,703,953		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan perekonomian dan pembangunan yang terfasilitasi	100 persen	579,311,247	100 persen	437,239,446	100 persen	414,851,976	100 persen	414,851,976	100 persen	829,703,953	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah koordinasi terkait kebijakan Perekonomian yang dijalankan	24 Koordinasi	120,816,547	24 Koordinasi	148,307,751	30 Dokumen	145,574,800	30 Dokumen	145,574,800	60 Dokumen	291,149,601		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD yang tersusun	18 Koordinasi	53,643,967	18 Dokumen	64,775,000	20 Dokumen	54,224,425	20 Dokumen	54,224,425	40 Dokumen	108,448,851	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian yang tersusun	2 Koordinasi	25,264,200	2 Laporan	48,071,250	5 Laporan	50,312,500	5 Laporan	50,312,500	10 Laporan	100,625,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil yang tersusun	4 Koordinasi	41,908,380	4 Dokumen	35,461,501	4 Dokumen	36,037,875	4 Dokumen	36,037,875	8 Dokumen	72,075,750	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD yang tersusun					1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	2 Dokumen	10,000,000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah koordinasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	22 Koordinasi	458,494,700	22 Koordinasi	288,931,695	22 Dokumen	269,277,176	22 Dokumen	269,277,176	44 Dokumen	538,554,352	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja yang tersusun	12 Koordinasi	440,028,900	12 Dokumen	267,173,820	14 Dokumen	246,475,700	14 Dokumen	246,475,700	28 Dokumen	492,951,400	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian yang tersusun	4 Koordinasi	4,545,200	4 Dokumen	9,630,150	4 Dokumen	10,284,266	4 Dokumen	10,284,266	8 Dokumen	20,568,532	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0004.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan yang tersusun	6 Koordinasi	13,920,600	6 Dokumen	12,127,725	4 Dokumen	12,517,210	4 Dokumen	12,517,210	8 Dokumen	25,034,420	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	99.49 Persen	156,070,672	100 Persen	67,393,025	100 Persen	64,457,656	100 Persen	46,657,656	100 Persen	111,115,312	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
				2. Prosentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan PD	100 Persen	21,330,080	100 Persen	25,051,645	100 Persen	26,625,000	100 Persen	25,425,000	100 Persen	52,050,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan,evaluasi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	3 Dokumen	17,044,840	3 Dokumen	20,763,795	3 Dokumen	21,625,000	3 Dokumen	20,425,000	6 Dokumen	42,050,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8,174,560	3 Dokumen	7,158,290	2 Dokumen	10,200,000	2 Dokumen	9,000,000	4 Dokumen	19,200,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	8,870,280	8 Laporan	8,347,790	8 Laporan	5,925,000	8 Laporan	5,925,000	16 Laporan	11,850,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NA Laporan		20 Laporan	5,257,715	20 Laporan	5,500,000	20 Laporan	5,500,000	40 Laporan	11,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	7 kegiatan	4,285,240	6 kegiatan	4,287,850	7 kegiatan	5,000,000	7 kegiatan	5,000,000	7 kegiatan	10,000,000		
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	4,285,240	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	NA	NA	12 Dokumen	4,287,850	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,000,000	24 Dokumen	10,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	5 layanan	50,156,002	2 layanan	53,468,300	2 layanan	30,950,000	2 layanan	30,950,000	2 layanan	61,900,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	50,156,002	2 Laporan	53,468,300	12 Laporan	30,950,000	12 Laporan	30,950,000	24 Laporan	61,900,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	4 paket	90,858,000	0 paket	-	1 paket	20,000,000	1 paket	1,200,000	2 paket	21,200,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	90,858,000	Unit	-	2 Unit	20,000,000	2 Unit	1,200,000	4 Unit	21,200,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	5,977,670	1 layanan	5,984,725	1 layanan	6,507,656	1 layanan	6,507,656	1 layanan	13,015,312		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,977,670	12 Laporan	5,984,725	12 Laporan	6,507,656	12 Laporan	6,507,656	24 Laporan	13,015,312	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 unit	9,079,000	15 unit	7,940,000	10 unit	7,000,000	10 unit	8,000,000	20 unit	15,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	9,079,000	15 Unit	7,940,000	10 Unit	7,000,000	10 Unit	8,000,000	20 Unit	15,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
				Nilai AKIP	62.25 -		63.04 -		64.31 -		64.95 -		64.95 -			
	Meningkatnya kualitas kebijakan ekonomi dan pembangunan			Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90 persen		111 Persen	329,518,181	100 persen	91,082,656	100 persen	92,082,656	100 persen	164,365,312		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan penyusunan pedoman perencanaan,pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100 Persen	244,190,850	100 Persen	237,073,511	100 Persen	276,470,000	100 Persen	295,470,000	100 Persen	571,940,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen Administراسي pembangunan	6 Dokumen	244,190,850	3 Dokumen	237,073,511	3 Dokumen	276,470,000	3 Dokumen	295,470,000	6 Dokumen	571,940,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi perencanaan program pembangunan	2 Dokumen	69,858,100	1 Dokumen	23,057,500	1 Dokumen	26,000,000	1 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	56,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian program	12 Dokumen	98,254,210	12 Dokumen	110,404,830	12 Dokumen	100,470,000	12 Dokumen	115,470,000	24 Dokumen	215,940,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0005.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Pelaporan administrasi pembangunan yang tersusun	28 Laporan	76,078,540	28 Laporan	103,611,181	28 Laporan	150,000,000	28 Laporan	150,000,000	56 Laporan	300,000,000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	97 persen	122,855,000	75 persen	40,655,945	100 persen	122,500,000	100 persen	62,500,000	100 persen	185,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
	2. Presentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah			100 persen	8,165,500	100 persen	8,308,600	100 persen	8,000,000	100 persen	8,000,000	100 persen	16,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	6 kegiatan	8,165,500	6 kegiatan	8,308,600	6 kegiatan	8,000,000	6 kegiatan	8,000,000	6 kegiatan	16,000,000		
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	8,165,500			-							
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	8,308,600	12 Dokumen	8,000,000	12 Dokumen	8,000,000	24 Dokumen	16,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3 layanan	45,180,000	3 layanan	32,256,100	3 layanan	50,000,000	3 layanan	50,000,000	3 layanan	100,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	45,180,000	56 laporan	32,256,100	12 Laporan	50,000,000	12 Laporan	50,000,000	24 Laporan	100,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	3 paket	69,300,000	0 paket	-	2 paket	60,000,000	paket	-	2 paket	60,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	69,300,000	unit	-	3 Unit	60,000,000	Unit		3 Unit	60,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	4,460,000	1 layanan	4,379,845	1 layanan	6,000,000	1 layanan	6,000,000	1 layanan	12,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,460,000	12 laporan	4,379,845	12 Laporan	6,000,000	12 Laporan	6,000,000	24 Laporan	12,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG

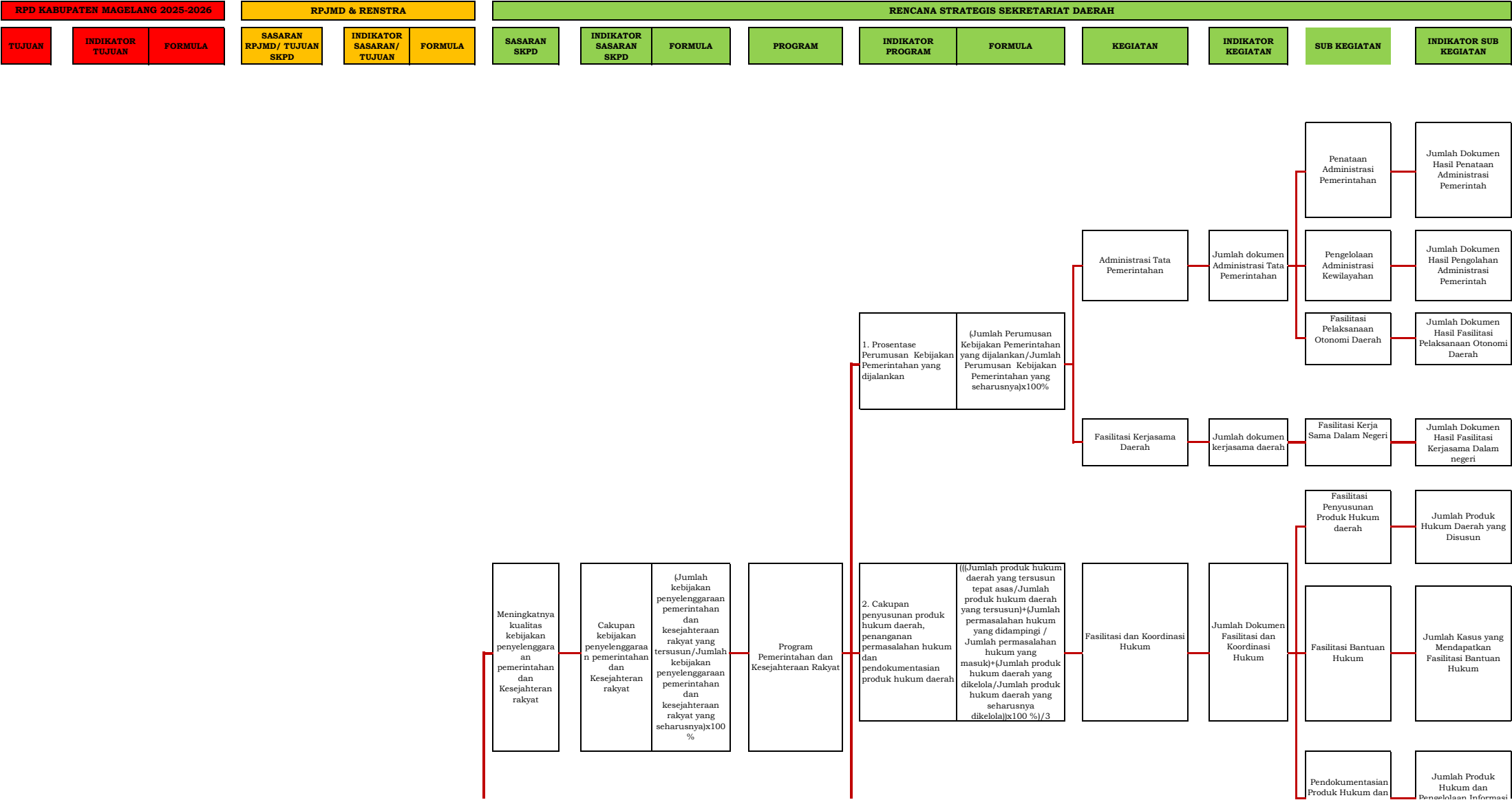
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah	4 unit	3,915,000	7 paket	4,020,000	10 unit	6,500,000	10 unit	6,500,000	20 unit	13,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3,915,000	7 unit	4,020,000	10 Unit	6,500,000	10 Unit	6,500,000	20 Unit	13,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
				Nilai AKIP	62.25 -		63.04 -		64.31 -		64.95 -		64.95 -			
				Cakupan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan Kesejahteran rakyat	100 Persen		100 Persen	22,683,441,035	100 persen	4,011,238,649	100 persen	4,071,238,649	100 persen	8,082,477,298		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 persen	17,192,096,438	100.00 persen	22,683,441,035	100 persen	4,011,238,649	100 persen	4,071,238,649	100 persen	8,082,477,298	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 Dokumen	17,192,096,438	3 Dokumen	22,683,441,035	3 Dokumen	4,011,238,649	3 Dokumen	4,071,238,649	6 Dokumen	8,082,477,298		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9 Dokumen	1,329,555,718	9 dokumen	22,533,370,855	9 Dokumen	3,654,000,000	9 Dokumen	3,714,000,000	18 Dokumen	7,368,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	15,845,293,720	4 dokumen	130,397,005	3 Dokumen	207,238,649	3 Dokumen	207,238,649	6 Dokumen	414,477,298	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0006.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	17,247,000	4 dokumen	19,673,175	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	300,000,000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			
	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,35 (Baik) -		85,60 (Baik) -		86,50 (Baik) -		87,50 (Baik) -		87,50 (Baik) -			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. cakupan kinerja layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	100 persen	488,683,486	100 Persen	633,502,311	100 persen	318,700,000	100 persen	318,700,000	100 persen	637,400,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
				2. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	100 persen	232,530,186	100 Persen	97,421,990	100 persen	132,734,000	100 persen	132,734,000	100 persen	265,468,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
				3. Persentase Ketercapaian perencanaan , evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	7,698,440	100 Persen	7,694,225	100 persen	8,000,000	100 persen	8,000,000	100 persen	16,000,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	kegiatan	7,698,440	6 kegiatan	7,694,225	6 kegiatan	8,000,000	6 kegiatan	8,000,000	6 kegiatan	16,000,000		
		4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	7,698,440	NA	NA								
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			13 Dokumen	7,694,225	12 Dokumen	8,000,000	12 Dokumen	8,000,000	24 Dokumen	16,000,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3 layanan	46,823,945	3 layanan	47,964,110	3 layanan	50,800,000	3 layanan	50,800,000	3 layanan	101,600,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	355 Laporan	46,823,945	155 Laporan	47,964,110	12 Laporan	50,800,000	12 Laporan	50,800,000	24 Laporan	101,600,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 paket	139,503,500	0 paket	-	1 paket	33,000,000	1 paket	33,000,000	2 paket	66,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	139,503,500	0 Unit		1 Unit	33,000,000	1 Unit	33,000,000	2 Unit	66,000,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	35,209,250	1 layanan	38,402,880	1 layanan	37,234,000	1 layanan	37,234,000	1 layanan	74,468,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	35,209,250	12 Laporan	38,402,880	12 Laporan	37,234,000	12 Laporan	37,234,000	24 Laporan	74,468,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 unit	10,993,491	15 unit	11,055,000	15 unit	11,700,000	15 unit	11,700,000	30 unit	23,400,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10,993,491	15 Unit	11,055,000	15 Unit	11,700,000	15 Unit	11,700,000	30 Unit	23,400,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	3 Fasilitasi	488,683,486	3 Fasilitasi	633,502,311	3 Fasilitasi	318,700,000	3 Fasilitasi	318,700,000	6 Fasilitasi	637,400,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	120 Laporan	122,827,694	120 Laporan	132,614,780	12 Laporan	108,700,000	12 Laporan	108,700,000	24 Laporan	217,400,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Komunikasi Pimpinan	24 Laporan	119,636,417	24 Laporan	219,062,930	12 Laporan	105,000,000	12 Laporan	105,000,000	24 Laporan	210,000,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0007.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	66 Laporan	246,219,375	66 Laporan	281,824,601	12 Laporan	105,000,000	12 Laporan	105,000,000	24 Laporan	210,000,000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KABUPATEN MAGELANG
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2			
	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	84,35 (Baik)	-	85,60 (Baik)	-	86,50 (Baik)	-	87,50 (Baik)	-	87,50 (Baik)	-		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	98.68 persen	9,865,175,986	109,33 persen	8,244,473,311	100 persen	3,598,784,445	100 persen	3,539,346,623	100 persen	7,138,131,068	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		2. Cakupan peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh		82.886 persen	1,503,392,721	83,33 persen	1,650,168,169	100 persen	975,000,000	100 persen	975,000,000	100 persen	1,950,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG	
		3. Persentase ketercapaian perencanaan,evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah		100 persen	14,123,036,475	100 persen	14,740,694,560	100 persen	23,300,870,597	100 persen	23,300,870,597	100 persen	46,601,741,194	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	17 kegiatan	14,123,036,475	17 kegiatan	14,740,694,560	19 kegiatan	23,300,870,597	19 kegiatan	23,300,870,597	19 kegiatan	46,601,741,194		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	13,978,347,615	146 orang/bulan	14,621,349,310	140 orang/bulan	23,220,870,597	140 orang/bulan	23,220,870,597	140 orang/bulan	46,441,741,194	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 dokumen	144,688,860	13 dokumen	119,345,250	13 dokumen	80,000,000	13 dokumen	80,000,000	26 dokumen	160,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 layanan	55,789,940	1 layanan	36,430,675	1 layanan	25,000,000	1 layanan	25,000,000	1 layanan	50,000,000		
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	55,789,940	12 Dokumen	36,430,675	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	50,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum	3 Layanan	1,779,124,831	3 Layanan	2,285,503,264	3 Layanan	660,000,000	3 Layanan	660,000,000	3 Layanan	1,320,000,000			
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 paket	128,166,500	70 paket	166,501,000	70 paket	35,000,000	70 paket	35,000,000	70 paket	70,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG	
	4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	23851 laporan	1,251,741,960	12 laporan	1,486,005,135	12 laporan	425,000,000	12 laporan	425,000,000	24 laporan	850,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG	

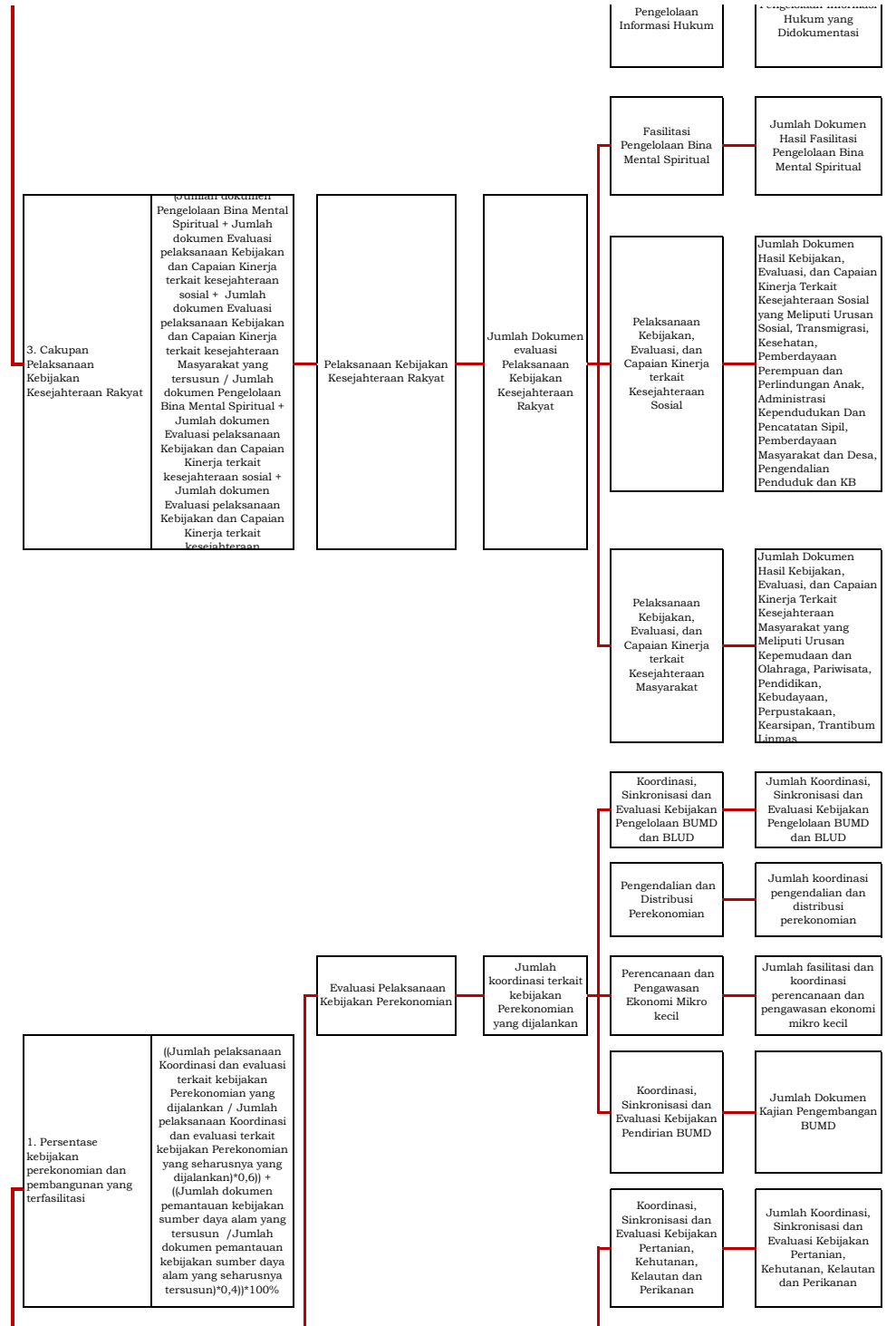
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023									
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215 laporan	399,216,371	215 laporan	632,997,129	12 laporan	200,000,000	12 laporan	200,000,000	24 laporan	400,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Paket	1,691,413,555	0 Paket	252,687,425	6 Paket	45,000,000	6 Paket	45,000,000	12 Paket	90,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Unit	262,476,260	1 paket	56,344,000	3 Unit	20,000,000	3 Unit	20,000,000	6 Unit	40,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1,428,937,295	1 Unit	196,343,425	3 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	6 Unit	50,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Layanan	2,177,937,429	4 Layanan	2,402,299,584	4 Layanan	2,108,784,445	4 Layanan	2,049,346,623	4 Layanan	4,158,131,068		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22231 Laporan	46,990,300	12 Laporan	46,968,100	12 Laporan	20,000,000	12 Laporan	20,000,000	24 Laporan	40,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	4 Laporan	973,131,957	36 Laporan	1,170,322,700	36 Laporan	500,000,000	36 Laporan	500,000,000	72 Laporan	1,000,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21005 laporan	257,834,670	12 laporan	291,390,850	12 laporan	90,000,000	12 laporan	90,000,000	24 laporan	180,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 laporan	899,980,502	12 laporan	893,617,934	12 laporan	1,498,784,445	12 laporan	1,439,346,623	24 laporan	2,938,131,068	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150 buah	4,160,910,231	150 buah	3,267,552,363	129 buah	760,000,000	129 buah	760,000,000	129 buah	1,520,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	200,979,710	4 Unit	192,424,456	4 Unit	150,000,000	4 Unit	150,000,000	4 Unit	300,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	90 Unit	941,984,193	90 Unit	930,139,669	90 Unit	350,000,000	90 Unit	350,000,000	90 Unit	700,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	8 Unit	67,157,000	13 Unit	79,527,534	12 Unit	10,000,000	12 Unit	10,000,000	12 Unit	20,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 Unit	158,662,630	74 Unit	161,868,000	14 Unit	50,000,000	14 Unit	50,000,000	14 Unit	100,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	2,792,126,698	9 Unit	1,903,592,704	9 Unit	200,000,000	9 Unit	200,000,000	9 Unit	400,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 layanan	1,215,440,721	4 layanan	1,298,043,169	4 layanan	800,000,000	4 layanan	800,000,000	4 layanan	1,600,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	14 orang/bulan	172,841,006	2 orang/bulan	174,671,878	2 orang/bulan	80,000,000	2 orang/bulan	80,000,000	2 orang/bulan	160,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	71 paket	104,137,269	58 paket	104,179,870	58 paket	60,000,000	58 paket	60,000,000	116 paket	120,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 orang	-	0 orang	-	8 orang	10,000,000	8 orang	10,000,000	8 orang	20,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	290 orang/bulan	938,462,446	240 orang/bulan	1,019,191,421	20 orang/bulan	650,000,000	20 orang/bulan	650,000,000	40 orang/bulan	1,300,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2 layanan	287,952,000	2 layanan	352,125,000	2 layanan	175,000,000	2 layanan	175,000,000	2 layanan	350,000,000		
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga Kepala Daerah	12 paket	161,976,000	12 paket	202,500,000	12 paket	100,000,000	12 paket	100,000,000	24 paket	200,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0008.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan Rumah tangga wakil Kepala Daerah	12 paket	125,976,000	12 paket	149,625,000	12 paket	75,000,000	12 paket	75,000,000	24 paket	150,000,000	BAGIAN UMUM	KABUPATEN MAGELANG

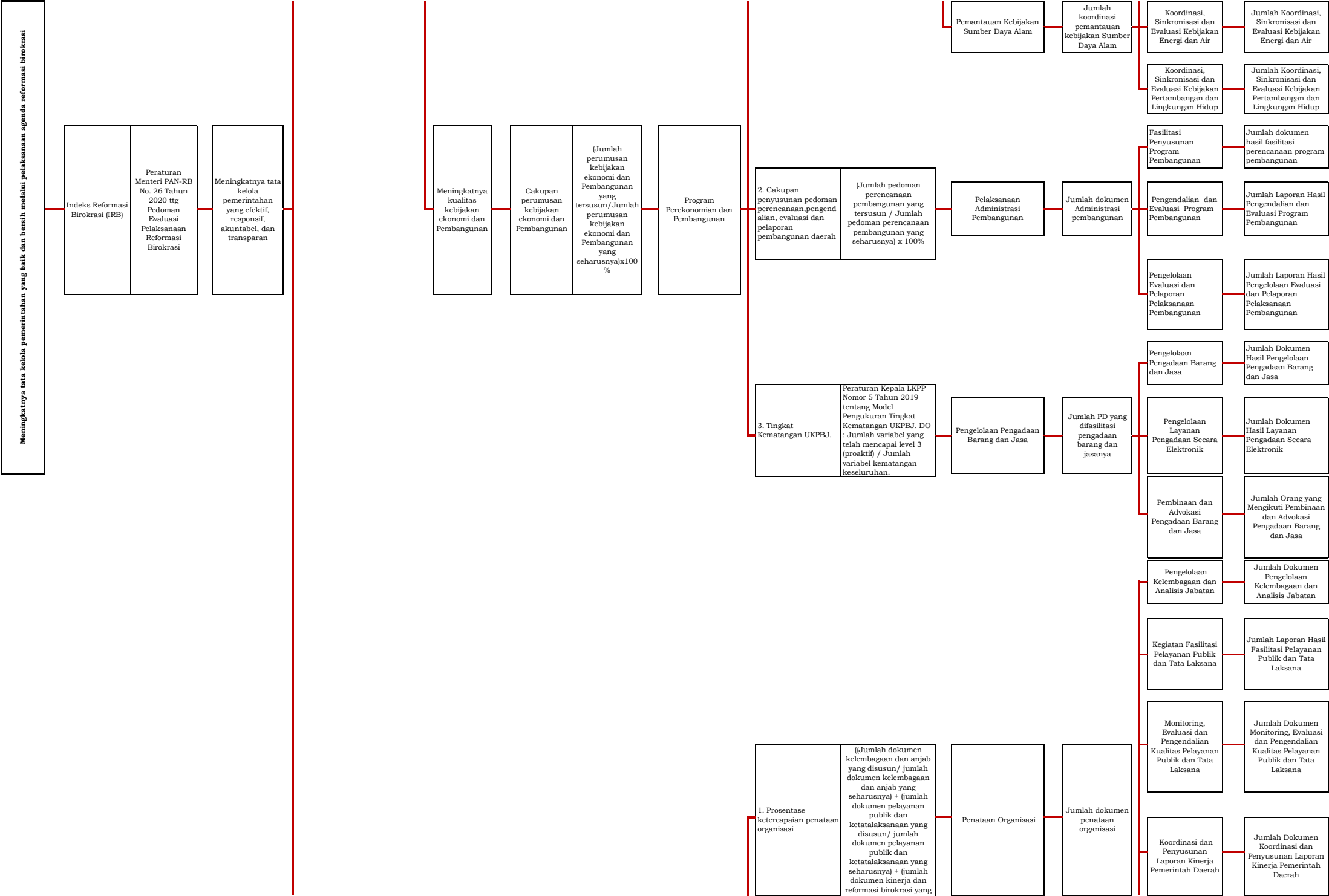
Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal Perencanaan				Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					Tahun 2022		Tahun 2023										
					Realisasi	Rp.	Realisasi	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12	13	14	
				Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.36		84.78		84.92		85.2		85.2				
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah 2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	100 persen	435,913,420	100 persen	135,037,198	100 persen	96,380,000	100 persen	96,380,000	100 persen	192,760,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
					100 persen	2,984,205	100 persen	3,015,900	100 persen	3,054,662	100 persen	3,054,662	100 persen	6,109,324	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	5 kegiatan	2,984,205	5 kegiatan	3,015,900	6 kegiatan	3,054,662	6 kegiatan	3,054,662	6 kegiatan	6,109,324			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	2,984,205	12 Dokumen	3,015,900	12 Dokumen	3,054,662	12 Dokumen	3,054,662	24 Dokumen	6,109,324	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	3 layanan	21,846,000	3 layanan	21,786,598	3 layanan	22,000,000	3 layanan	22,000,000	3 layanan	44,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	21,846,000	36 laporan	21,786,598	12 Laporan	22,000,000	12 Laporan	22,000,000	24 Laporan	44,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	1 paket	402,580,000	1 paket	98,900,000	1 paket	60,000,000	1 paket	60,000,000	2 paket	120,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	402,580,000	1 unit	98,900,000	4 Unit	60,000,000	4 Unit	60,000,000	8 Unit	120,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 layanan	4,203,420	1 layanan	4,266,600	1 layanan	4,200,000	1 layanan	4,200,000	1 layanan	8,400,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,203,420	12 laporan	4,266,600	12 Laporan	4,200,000	12 Laporan	4,200,000	24 Laporan	8,400,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 unit	7,284,000	14 unit	10,084,000	18 unit	10,180,000	18 unit	10,180,000	36 unit	20,360,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0001.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	7,284,000	14 unit	10,084,000	18 Unit	10,180,000	18 Unit	10,180,000	36 Unit	20,360,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
				Nilai AKIP	62.25 -		63.04 -		64.31 -		64.95 -		64.95 -				
	Meningkatnya kualitas kebijakan ekonomi dan pembangunan			Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan	90 Persen	431,613,625	111 Persen	586,744,400	100 persen	459,434,662	100 persen	459,434,662	100 persen	918,869,324			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat Kematangan UKPBJ	level 3 Level (4/9) Progres	592,057,090	level 3 (8/9) level (progress)	448,691,302		360,000,000		360,000,000		720,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	52.5 Cukup		74.41 Baik		78 Baik	360,000,000	80 Baik	360,000,000	80 Baik	720,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah SKPD yang difasilitasi pengadaan barang dan jasanya	48 SKPD	592,057,090	48 SKPD	448,691,302	48 SKPD	360,000,000	48 SKPD	360,000,000	48 SKPD	720,000,000			
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	86 Dokumen	343,409,080	60 Dokumen	188,183,602	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	300,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	59,257,470	1 Dokumen	69,803,300	1 Dokumen	90,000,000	1 Dokumen	90,000,000	2 Dokumen	180,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
		4.01.4.01.0.00.0.00.01.0009.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	189,390,540	81 orang	190,704,400	80 Orang	120,000,000	80 Orang	120,000,000	160 Orang	240,000,000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KABUPATEN MAGELANG	
Jumlah					47,996,286,964		52,256,545,345		35,019,477,364		34,960,039,542		69,979,516,907				

Lampiran 2: Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang 2025-2026



Nilai AKIP	Permenpan RE Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
------------	---





POHON KINERJA T DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TUJUAN	Mengkaji tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi		
Indikator Kinerja	6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
Sasaran Daerah Tahun PD	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan		
Indikator Kinerja	6.1	Nilai AKP	

Sumber Data : Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2025-2026

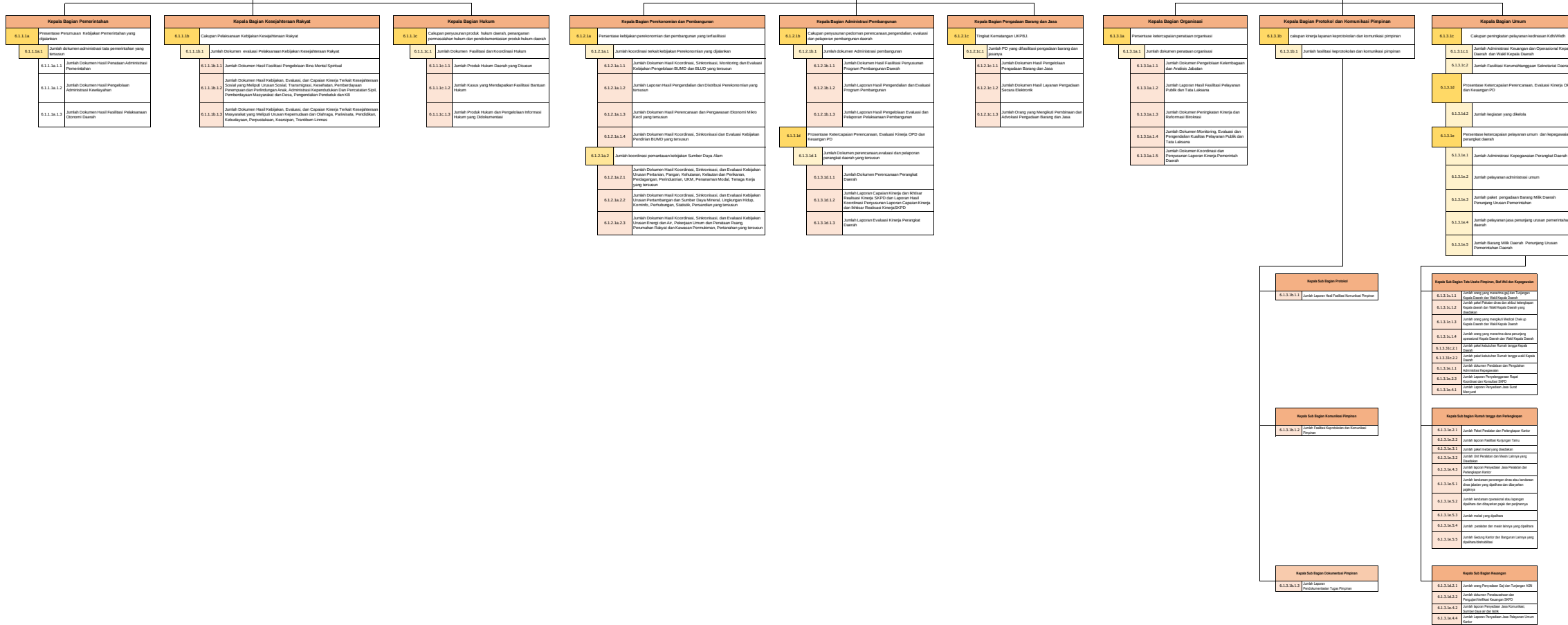
Penetapan : Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

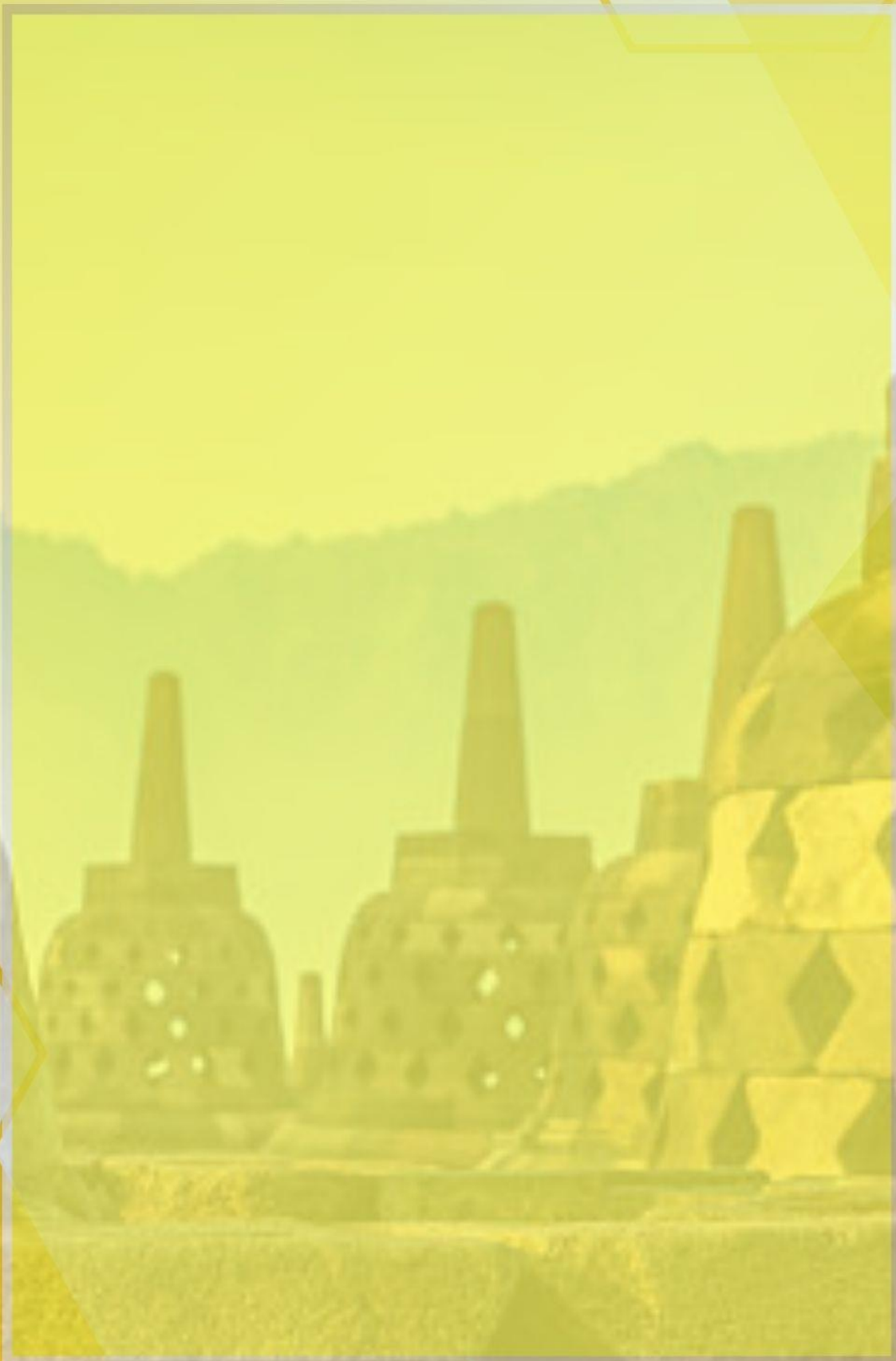
Kepala Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Sasaran PD	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	
Indikator Kinerja	6.1.1	Capaian kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
Sasaran PD :	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Ekonomi Dan Pembangunan	
Indikator Kinerja :	6.1.2	Cakupan perumusan kebijakan ekonomi dan Pembangunan

Asisten Administrasi Umum		
Sasaran PD :	Meningkatnya kualitas administrasi umum kesekretariatan daerah	
Indikator Kinerja :	6.1.3	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)





**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024**